

**FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MENURUNNYA
AKTIVITAS KADER GARUDA KEADILAN SAYAP PARTAI
KEADILAN SEJAHTERA REKRUTMEN 2024**

Skripsi

Oleh

TIKA APRILA

NPM 2216021008



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

**FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MENURUNNYA
AKTIVITAS KADER GARUDA KEADILAN SAYAP PARTAI
KEADILAN SEJAHTERA REKRUTMEN 2024**

Oleh

TIKA APRILA

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

**FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MENURUNNYA
AKTIVITAS KADER GARUDA KEADILAN SAYAP PARTAI KEADILAN
SEJAHTERA REKRUTMEN 2024**

Oleh
TIKA APRILA

Garuda Keadilan merupakan sayap kepemudaan yang bersifat eksklusif karena, karena anggotanya adalah pemuda pemudi yang dilahirkan oleh orang tua yang merupakan anggota Partai Keadilan Sejahtera. Garuda Keadilan periode 2020-2024 data menunjukkan bahwa kader yang telah direkrut tidak semua tetap aktif dalam aktivitas organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi menurunnya aktivitas kader Garuda Keadilan Provinsi Lampung. Penelitian ini menggunakan teori kaderisasi oleh Syamsuddin Haris dkk., yaitu 1) Adanya tata norma, aturan dan institusi; 2) Adanya model rekrutmen yang terbuka dan demokratis; 3) Terdapatnya sistem evaluasi pembinaan kader; 4) Membentuk jaringan kerja kader; 5) Perlu dilakukan *affirmative action*; 6) Model pembinaan kader perempuan. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurunnya tingkat keaktifan dan partisipasi kader Garuda Keadilan dalam kegiatan organisasi dipengaruhi oleh belum optimalnya sistem kaderisasi organisasi yang berjalan secara menyeluruh, terlembaga, dan berkelanjutan. Belum adanya Standar Operasional Prosedur kaderisasi yang tertulis jelas, model rekrutmen yang secara prosedur terbuka namun secara struktural masih didominasi oleh jaringan internal, lemahnya pelaksanaan pembinaan dan evaluasi kader yang tidak dilakukan secara rutin, serta pembentukan jaringan kerja dan interaksi antar kader yang belum merata. Penerapan prinsip *affirmative action* dan keterlibatan kader perempuan dalam struktur organisasi telah berjalan cukup baik, namun belum didukung oleh model pembinaan khusus yang terarah. Menurunnya keaktifan kader Garuda Keadilan dapat dipengaruhi oleh belum optimalnya sistem kaderisasi organisasi yang berjalan secara menyeluruh, terlembaga, dan berkelanjutan yang menunjukkan bahwa sistem kaderisasi masih memerlukan penguatan pada berbagai tahapan pelaksanaannya.

Kata Kunci: Garuda Keadilan, Kaderisasi, Keaktifan Kader.

ABSTRACT

FACTORS INFLUENCING THE DECLINE IN THE ACTIVITIES OF GARUDA KEADILAN CADRES, THE YOUTH WING OF THE PROSPEROUS JUSTICE PARTY RECRUITMENT 2024

By

TIKA APRILA

Garuda Keadilan is an exclusive youth wing, because its members are young men and women born to parents who are members of the Prosperous Justice Party. Garuda Keadilan data for the 2020-2024 period active in organizational activities. This study aims to determine the factors that influence the decline in activity of Garuda Keadilan cadres in Lampung Province. This study uses the cadre formation theory by Syamsuddin Haris et al., namely 1) The existence of norms, rules, and institutions; 2) The existence of an open and democratic recruitment model; 3) The existence of a cadre development evaluation system; 4) Forming a cadre network; 5) The need for affirmative action; 6) A model for developing female cadres. The research method used is descriptive qualitative. Data collection techniques are carried out through interviews and documentation. The results of the study indicate that the declining level of activity and participation of Garuda Keadilan cadres in organizational activities is influenced by the less than optimal organizational cadre development system that runs comprehensively, institutionally, and sustainably. The absence of a clearly written Standard Operating Procedure for cadre development, a recruitment model that is procedurally open but structurally still dominated by internal networks, weak implementation of cadre development and evaluation that is not carried out routinely, and the formation of networks and interactions between cadres that are not evenly distributed. The application of the principle of affirmative action and the involvement of female cadres in the organizational structure has been running quite well, but has not been supported by a specific, targeted development model. The declining activity of Garuda Keadilan cadres may be influenced by the less than optimal organizational cadre development system that runs comprehensively, institutionally, and sustainably, which indicates that the cadre development system still needs strengthening at various stages of its implementation.

Keywords: Garuda Keadilan, Cadre Development, Cadre Activity

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi

: FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
MENURUNNYA AKTIVITAS KADER GARUDA
KEADILAN SAYAP PARTAI Keadilan
SEJAHTERA REKRUTMEN 2024

Nama Mahasiswa

: **Tika Aprila**

No. Pokok Mahasiswa

: 2216021008

Program Studi

: S-1 Ilmu Pemerintahan

Jurusan

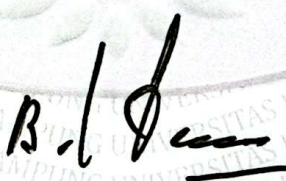
: Ilmu Pemerintahan

Fakultas

: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Budi Harjo, S.Sos., M.IP.
NIP. 19680112199801101

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

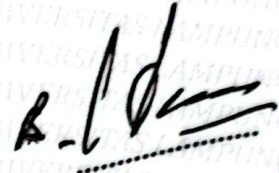

Dr. Tabah Maryanah, S.IP., M.Si.
NIP. 197106042003122001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: **Budi Harjo, S.Sos., M.IP.**



Penguji Utama

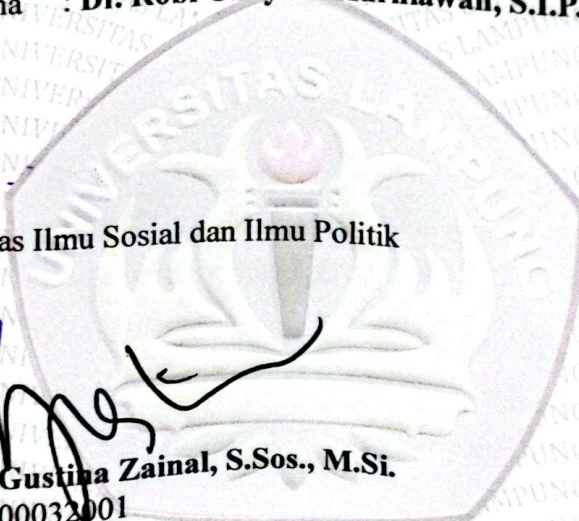
: **Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.I.P., M.A.**

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.

NIP. 19760821200032001



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 02 Maret 2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi yang saya susun merupakan karya asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik Sarjana, baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Skripsi ini sepenuhnya merupakan gagasan, rumusan, dan hasil penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dan bimbingan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan menyebutkan nama pengarang serta dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh melalui skripsi ini, serta sanksi lain sesuai dengan ketentuan dan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 23 Februari 2026
Yang Membuat Pernyataan



Tika Aprila
NPM 2216021008

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Tika Aprila, lahir di Oku Timur, Sumatera Selatan pada tanggal 22 April 2004. Penulis merupakan anak pertama dari pasangan Bapak Darsono dan Ibu Evi. Penulis memiliki adik bernama Dhea Alvinanda dan Davi Rafandra. Jenjang pendidikan penulis dari TK Darul Muttaqin tahun 2009-2010, SDN 4 Trimoharjo tahun 2010-2016, SMP Negeri 1 Semendawai Suku III tahun 2016-2019, SMA Negeri 1 Semendawai Suku III tahun 2019-2022, dan melanjutkan jenjang perkuliahan di Universitas Lampung tahun 2022 melalui jalur SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri) di Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Selama menjadi mahasiswa Ilmu Pemerintahan, penulis tidak hanya aktif dalam kegiatan akademik, tetapi juga berpartisipasi sebagai anggota dalam Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Taekwondo. Pada tahun 2025, penulis melakukan KKN (Kuliah Kerja Nyata) selama 32 hari di desa Dharma Agung Mataram, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah dan berkesempatan melakukan program MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) selama 6 bulan di Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Lampung.

MOTTO HIDUP

“Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah:6)

“Pulang sebagai sarjana adalah bentuk tanggung jawab kepada orang tua”

“Bagaimanapun rumitnya, mari tetap percaya bahwa semua mampu dihadapi dan pasti bisa dilewati”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil' alamin

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah meridhai setiap langkah dan ikhtiar, sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada nabi Muhammad SAW, semoga kelak skripsi ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat.

dan

Dengan ketulusan dan kerendahan hati, kupersembahkan tulisan sederhana ini teruntuk:

Papa dan Mama tercinta

Darsono dan Evi

Terima kasih atas doa yang senantiasa mengiringi setiap langkahku, atas pengorbanan yang tidak pernah diperhitungkan, serta setiap lelah yang disembunyikan demi masa depanku. Skripsi ini adalah wujud kecil dari bakti dan rasa terima kasihku. Semoga karya ini menjadi kebanggaan atas segala perjuangan yang telah kalian berikan.

Terima kasih untuk semua yang mendo'akan dan mendukung selesainya skripsi ini, semoga segala kebaikan mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Almamater yang penulis banggakan

Universitas Lampung

SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Menurunnya Aktivitas Kader Garuda Keadilan Sayap Partai Keadilan Sejahtera Rekrutmen 2024”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki. Skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Suatu kehormatan dan kebanggaan bagi penulis melalui sanwacana ini mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang berkenan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, diantaranya:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng, selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
3. Bapak Prof. Dr. Noverman Duadji, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik;
4. Bapak Dr. Arif Sugiono, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum;
5. Bapak Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.I.P., M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan sekaligus Dosen penguji. Dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa terima kasih atas kesediaan Bapak meluangkan waktu untuk menguji serta memberikan berbagai masukan yang sangat berarti bagi penyempurnaan skripsi ini. Terima kasih atas segala ketelitian dan kesabaran yang diajarkan sehingga skripsi ini dapat

terselesaikan dengan baik. Semoga setiap ilmu dan kebaikan yang Bapak berikan menjadi amal yang terus mengalir serta membawa keberkahan dan Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan perlindungan untuk Bapak beserta keluarga;

6. Ibu Dr. Tabah Maryanah, S.I.P., M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung;
7. Bapak Prof. Dr. Syarief Makhya, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik;
8. Bapak Budi Harjo, S.Sos., M.IP., selaku Dosen Pembimbing. Penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesabaran, ketulusan, serta perhatian yang luar biasa dalam membimbing penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Setiap arahan, masukan, dan koreksi yang diberikan menjadi pegangan bagi penulis untuk terus belajar dan memperbaiki kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih selalu bersedia dihubungi dan ditemui ditengah kesibukan yang ada. Semoga segala ilmu dan kebaikan yang bapak berikan menjadi amal yang terus mengalir, serta Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, dan perlindungan kepada Bapak beserta keluarga;
9. Seluruh Dosen dan Staf Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Penulis menyampaikan terima kasih yang tulus atas segala ilmu, bimbingan, serta bantuan yang telah diberikan selama masa perkuliahan. Meskipun tidak dapat disebutkan satu persatu, hal tersebut tidak mengurangi rasa hormat penulis kepada Bapak dan Ibu sekalian. Dedikasi serta bantuan dalam berbagai hal, termasuk dukungan administratif, sangat berarti hingga penulis dapat menyelesaikan studi ini. Semoga Bapak dan Ibu senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, dan perlindungan oleh Allah SWT;
10. Seluruh jajaran pengurus dan keluarga besar DPW PKS Lampung dan GK Lampung. Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan dan dukungan yang diberikan, baik selama pelaksanaan magang maupun dalam proses penyusunan skripsi ini. Bagi penulis, PKS dan GK bukan sekedar tempat belajar, melainkan juga ruang kebersamaan

yang menghadirkan kehangatan dan rasa kekeluargaan serta pengalaman yang sangat berarti yang penulis peroleh. Semoga seluruh jajaran dan pengurus dan anggota senantiasa diberikan keberkahan, kebahagiaan, serta lindungan oleh Allah SWT;

11. Kedua Orangtuaku. Papa dan Mama dengan segala kerendahan hati dan rasa cinta yang mendalam, penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga atas setiap doa, pengorbanan, dan kasih sayang yang tiada henti. Papa selalu memberikan yang terbaik, sehingga penulis tidak pernah merasa kekurangan apapun. Papa adalah motivasi terbesar penulis untuk terus berkembang dan menjadi pribadi yang lebih baik. Dan kepada mama hebatku, yang selalu menguatkan dengan doa dan kasih sayangnya, terima kasih karena tidak pernah lelah menemani setiap proses yang penulis lalui. Mama adalah tempat berbagi cerita, sumber ketenangan, sekaligus penyemangat ketika penulis merasa lelah. Tanpa dukungan, kepercayaan, dan doa Papa dan Mama, penulis tidak akan mampu sampai pada titik ini. Setiap lelah yang Papa dan Mama sembunyikan, setiap harapan yang diselipkan dalam doa, menjadi kekuatan besar bagi penulis untuk terus berjuang dan menyelesaikan skripsi ini. Semua pencapaian ini penulis persembahkan untuk Papa dan Mama. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, dan kebahagiaan yang panjang untuk Papa dan Mama, serta memberikan kesempatan kepada penulis untuk terus membahagiakan dan membanggakan kalian;
12. Kepada adik kandungku Dhea Alvinanda dan Davi Rafandra. Terima kasih atas kehadiran kalian yang selalu membawa kebahagiaan dalam hidup penulis. Dukungan, doa, serta semangat yang kalian berikan, meskipun sering kali sederhana, sangat berarti dalam setiap proses yang penulis jalani. Kalian menjadi pengingat bagi penulis untuk terus berusaha menjadi contoh yang baik dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan. Melihat kalian tumbuh dan berproses menjadi motivasi tersendiri bagi penulis untuk terus berusaha memberikan yang terbaik. Semoga Dhea dan Davi selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta tumbuh menjadi pribadi yang kuat, rendah hati, dan berhasil meraih setiap cita-cita yang diimpikan;

13. Kepada Yayi Hatta dan Nyai Asiyah (Alm). Penulisan menyampaikan penuh rasa hormat dan terima kasih yang tulus kepada Yayi Hatta yang telah banyak berjasa dalam perjalanan hidup penulis. Nasihat, perhatian, serta dukungan yang Yayi berikan menjadi bagian penting dalam proses tumbuh dan perjuangan penulis hingga sampai tahap ini. Untuk Nyai Asiyah (Alm), penulis menyimpan doa dan kerinduan yang tulus. Kehangatan dan kasih sayang beliau akan selalu hidup dalam ingatan dan hati penulis. Semoga Allah SWT melapangkan kuburnya, dan menempatkan beliau di tempat terbaik di sisi-Nya;
14. Kepada keluarga Kakek Sudarto dan Nenek Ngatinem, beserta seluruh keluarga besar. Penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih atas doa serta dukungan yang telah diberikan selama ini. Dukungan keluarga, baik dalam bentuk nasihat maupun motivasi, telah membantu penulis untuk tetap bersemangat dalam menjalani setiap proses akademik. Semoga Kakek, Nenek, dan seluruh keluarga besar senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan oleh Allah SWT;
15. Kepada Pak Bintang, Cicik, dan keponakanku tercinta, Omaira Gustika Putri. Penulis menyampaikan terima kasih yang tulus atas perhatian, dukungan, dan kasih sayang yang telah diberikan selama ini. Kehadiran Pak Bintang, dan Cicik selalu menjadi penyemangat dan sumber motivasi, sementara Omaira keponakanku yang lucu selalu menghadirkan kebahagiaan dan keceriaan dalam setiap langkah penulis. Semoga Pak Bintang, Cicik dan Omaira selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberkahan oleh Allah SWT;
16. Kepada sahabatku, Lailatul Sangadah, Indah Marsya Fitadea, Bela Diana, Fatikhatun Nikmah dan Khusnul Kholifah. Penulis menyampaikan terima kasih yang tulus atas kehadiran kalian dalam perjalanan penulis. Kalian selalu menjadi sahabat yang dapat diandalkan, tempat berbagi cerita, tempat curhat, dan sumber semangat yang membuat penulis merasa tidak sendiri dalam menghadapi setiap tantangan. Semoga kebaikan serta doa kalian senantiasa menjadi berkah dan kembali kepada kalian dari Allah SWT;

17. Kepada sahabatku di masa kuliah, Klarisa Arta Mevia, Nadia Eksa Anisa Putri, Nasya Tsabitah, dan Natasha Dwi Yatna. Terima kasih sudah menemani penulis, seorang anak rantau yang sendirian dikota orang, sehingga penulis selalu merasa tidak sendiri dalam menghadapi tantangan perkuliahan dan kehidupan sehari-hari. Kalian selalu menjadi teman berbagi cerita, tempat berdiskusi, dan sumber semangat ketika menghadapi tugas dan kesulitan. Walaupun setelah perjalanan ini akan kembali ke tempat masing-masing, penulis berharap persahabatan dan kenangan yang telah terjalin tetap terjaga. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan oleh Allah SWT;
18. Kepada sahabat KKN dan masyarakat Dharma Agung Mataram. Penulis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan penerimaan yang hangat selama 32 hari. Terima kasih kepada sahabat KKN telah menjadi teman belajar, berbagi cerita, dan menghadapi tantangan bersama, sehingga pengalaman KKN ini menjadi pengalaman yang tidak terlupakan. Kepada keseluruhan masyarakat Dharma terima kasih telah menerima kami dengan begitu hangat, setiap cerita dan pengalaman di sana akan selalu menjadi bagian berharga dalam perjalanan hidup penulis. Senang bisa bertemu dan belajar bersama.

Bandar Lampung, 18 Februari 2026
Penulis,

Tika Aprila

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR SINGKATAN	vi
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
II. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Tinjauan Partai Politik	9
2.1.1 Definisi Partai Politik	9
2.1.2 Fungsi Partai Politik	10
2.1.3 Kaderisasi Politik	12
2.2 Hubungan Sayap Partai dengan Partai Politik.....	18
2.3 Kerangka Pikir.....	19
III. METODE PENELITIAN	21
3.1 Jenis Penelitian	21
3.2 Fokus Penelitian	22
3.3 Lokasi Penelitian	24
3.4 Informan Penelitian	24
3.5 Jenis dan Sumber Data	25
3.6 Teknik Pengumpulan Data	26
3.7 Teknik Pengolahan Data	26
3.8 Teknik Analisa Data	27
3.9 Teknik Keabsahan Data	28
IV. GAMBARAN UMUM	29
4.1 Gambaran Umum Partai Keadilan Sejahtera.....	29
4.1.1 Sejarah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Lampung.....	29
4.1.2 Visi dan Misi Partai Keadilan Sejahtera.....	30
4.1.3 Tujuan dan Fungsi Partai Keadilan Sejahtera.....	30
4.2 Gambaran Umum Sayap Partai	31
4.2.1 Definisi Sayap Partai.....	31

4.2.2 Fungsi Sayap Partai.....	34
4.3 Gambaran Umum Garuda Keadilan.....	35
4.3.1 Sejarah Garuda Keadilan.....	35
4.3.2 Visi dan Misi Garuda Keadilan.....	36
4.3.3 Struktur Pimpinan Garuda Keadilan	36
V. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	41
5.1 Hasil Penelitian.....	41
5.1.1 Tata Norma, Aturan, dan Tata Institusi dalam Membentuk Sistem Pengkaderan.....	41
5.1.2 Model Rekrutmen Yang Terbuka dan Demokratis.....	46
5.1.3 Sistem Evaluasi Pembinaan Kader Yang Berkesinambungan.....	52
5.1.4 Jaringan Kerja Kader Melalui Interaksi Antar Kader.....	59
5.1.5 <i>Affirmative Action</i>	67
5.1.6 Model Pembinaan Perempuan Kader Partai.....	71
5.2 Pembahasan.....	76
5.2.1 Tata Norma, Aturan, dan Tata Institusi dalam Membentuk Sistem Pengkaderan.....	76
5.2.2 Model Rekrutmen Yang Terbuka dan Demokratis.....	78
5.2.3 Sistem Evaluasi Pembinaan Kader Yang Berkesinambungan.....	80
5.2.4 Membentuk Jaringan Kerja Kader Melalui Interaksi Antar Kader...83	
5.2.5 Perlu <i>Affirmative Action</i>	85
5.2.6 Model Pembinaan Perempuan Kader Partai.....	87
VI. SIMPULAN DAN SARAN.....	91
6.1 Simpulan.....	91
6.2 Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA.....	94
LAMPIRAN.....	97

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jumlah Kader PKS Provinsi Lampung periode 2020 dan 2024.....	3
2. Jumlah Kader Muda Garuda Keadilan Provinsi Lampung	3
3. Informan Peneliti.....	25
4. Struktur Pimpinan GK Periode 2025-2028.....	36
5. Perbandingan Pernyataan Tata Norma, Aturan, dan Tata Institusi.....	45
6. Perbandingan Pernyataan Model Rekrutmen.....	51
7. Perbandingan Pernyataan Sistem Evaluasi Pembinaan Kader.....	58
8. Perbandingan Pernyataan Jaringan Kerja Kader Melalui Interaksi.....	66
9. Perbandingan Pernyataan <i>Affirmative Action</i>	70
10. Perbandingan Pernyataan Model Pembinaan Perempuan.....	75
11. Hasil Penelitian Indikator.....	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pikir	20
2. Code of Conduct	42
3. Code of Conduct	43
4. Open Recruitment GK Lampung	47
5. Pengumuman Hasil Seleksi.....	48
6. Keanggotaan.....	50
7. LKTM-TD.....	55
8. Meet and Greet.....	57
9. Rapat GK Lampung	60
10.Olahraga Bareng GK.....	63
11. Milad GK.....	64
12. Gerak Bareng GK.....	64
13. Saresehan	68
14. Struktur GK Lampung	69
15. Muswil	73

DAFTAR SINGKATAN

AD/ART	: Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga
DPTW	: Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah
DPW	: Dewan Pengurus Wilayah
DSW	: Dewan Syariah Wilayah
PKS	: Partai Keadilan Sejahtera
GK	: Garuda Keadilan
IC	: Indikator Capaian
KKP	: Kurikulum Kaderisasi Partai Anggota
KTA	: Kartu Tanda Anggota
MPW	: Majelis Pertimbangan Wilayah
UPA	: Unit Pembinaan Anggota

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Partai politik berperan sebagai sarana yang memberikan kesempatan bagi warga negara untuk turut serta dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Keberadaan partai politik sudah sangat dikenal di kalangan masyarakat. Sebagai institusi politik, keberadaan partai tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan melalui proses sejarah yang panjang meskipun usianya masih tergolong muda. Dibandingkan dengan institusi kenegaraan, partai politik merupakan organisasi yang relatif muda. Semakin optimal fungsi dan peran partai politik dijalankan, maka semakin tinggi pula kualitas demokrasi yang tercipta. Oleh sebab itu, mempelajari dan mengamati dinamika partai politik di Indonesia menjadi hal yang penting agar peran serta fungsinya dapat terlaksana secara optimal, demi mendorong terciptanya demokrasi yang lebih maju di tanah air. Sebagai penggerak utama, partai politik tidak akan berjalan efektif tanpa dukungan kader yang berkualitas dan berintegritas. Karena itu, partai menjalankan proses kaderisasi dan perekrutan politik. Kedua proses ini perlu dilakukan secara terencana, sistematis, dan meluas, dimulai dari tingkat bawah (Tumanduk dkk., 2022).

Dalam struktur partai politik modern, keberadaan organisasi sayap, khususnya sayap kepemudaan menjadi elemen strategis dalam menunjang keberlangsungan partai. Sayap kepemudaan dibentuk sebagai instrument partai untuk menjangkau generasi muda, menanamkan nilai-nilai ideologis, serta membentuk

kader-kader yang berkomitmen terhadap visi dan misi partai. Setiap partai politik memiliki bentuk dan karakteristik organisasi sayap yang berbeda, sesuai dengan kebutuhan serta arah perjuangannya. Dalam konteks tersebut, Partai Keadilan Sejahtera menjadi salah satu contoh partai yang menempatkan peran kader muda sebagai bagian penting dalam proses regenerasi dan pelaksanaan misi dakwah politiknya. Sebagai partai yang berbasis islam Partai Keadilan Sejahtera turut mengembangkan organisasi sayap kepemudaan bernama Garuda Keadilan yang bersifat eksklusif, karena anggotanya terdiri dari putra-putri kader Partai Keadilan Sejahtera. Hal ini ditegaskan dalam AD/ART GK 2022-2025 Bab IV Pasal 11, yang menyatakan bahwa anggota Garuda Keadilan adalah pemuda pemudi yang dilahirkan oleh orang tua yang merupakan anggota Partai Keadilan Sejahtera (Soraya dkk., 2025).

Menurut (Soraya dkk., 2025) peran Garuda Keadilan sangat penting bagi Partai Keadilan Sejahtera karena sebagai bentuk respon atas kekhawatiran terhadap pengaruh negatif globalisasi dan kehilangan arah dalam perjuangan sosial dan politik. Kehadiran Garuda Keadilan diharapkan dapat menjadi wadah bagi pemuda dalam melanjutkan misi dakwah islam. Sebagai sayap Partai Keadilan Sejahtera, Garuda Keadilan berperan sebagai rumah besar bagi anak-anak kader mengekspresikan minat dan bakatnya. Karena Garuda Keadilan memiliki fokus menciptakan lingkungan yang positif, menyalurkan dan mengembangkan minat dan bakat, serta menyiapkan pemimpin masa depan.

Keberadaan kader Partai Keadilan Sejahtera tidak hanya berfungsi sebagai pilar utama dalam menggerakkan organisasi partai, tetapi juga menjadi indikator penting dalam memperkirakan potensi jumlah anggota pada Garuda Keadilan, yang pada dasarnya beranggotakan anak-anak kader Partai Keadilan Sejahtera. semakin besar pula peluang bagi Garuda Keadilan untuk memperluas keanggotaannya. Untuk melihat potensi tersebut, berikut data jumlah kader Partai Keadilan Sejahtera di Provinsi Lampung dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Kader Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Lampung periode 2020 dan 2024

No	Tahun	Laki-laki	Perempuan	Total
1	2020	8.634	9.199	17.833
2	2024	5.050	10.724	15.774

Sumber: DPW PKS Provinsi Lampung 2025

Berdasarkan dari jumlah kader Partai Keadilan Sejahtera yang ada, sebenarnya ada peluang bagi Garuda Keadilan untuk memiliki anggota yang lebih banyak meski jumlahnya tentu tidak bisa sepenuhnya disamakan, sebab tidak semua kader Partai Keadilan Sejahtera memiliki putra-putri yang sudah cukup umur untuk menjadi bagian dari Garuda Keadilan.

Garuda Keadilan sebagai organisasi sayap Partai Keadilan Sejahtera memiliki tujuan untuk berkembang menjadi organisasi besar yang ditandai dengan jumlah kader yang banyak. Untuk mencapai tujuan tersebut, Garuda Keadilan secara konsisten melaksanakan rekrutmen keanggotaan. Berikut data jumlah kader Garuda Keadilan di Provinsi Lampung dari tahun 2012 hingga 2024:

Tabel 1.2 Jumlah Kader Muda Garuda Keadilan Provinsi Lampung

Tahun	Jumlah Direkrut	Jumlah Aktif	Jumlah Tidak Aktif
2012	42	34	8
2017	39	20	19
2020	56	30	26
2024	30	15	15
Total	167	99	68

Sumber: GK Provinsi Lampung, 2025

Berdasarkan data yang telah dipaparkan, dapat dipahami bahwa Garuda Keadilan memiliki pola rekrutmen yang dilaksanakan satu kali dalam setiap periode kepemimpinan. Pada periode kepemimpinan 2012-2015 proses rekrutmen dilakukan pada tahun 2012 dengan jumlah 42 orang yang direkrut,

dan 34 diantaranya tercatat anggota aktif. Selanjutnya, pada periode 2016-2019, rekrutmen dilakukan pada tahun 2017 dengan total 39 kader baru, namun hanya 20 orang yang bertahan aktif. Kemudian periode 2020-2024, Garuda Keadilan melaksanakan dua kali kegiatan rekrutmen, yakni pada tahun 2020 dan 2024. Pada tahun 2020 berhasil merekrut 56 kader, dengan 30 orang yang masih aktif, sedangkan pada rekrutmen tahun 2024 terdapat 30 kader baru dan hanya 15 yang tetap aktif. Dari data tersebut tampak adanya penurunan jumlah kader aktif Garuda Keadilan, yang mana perlu diketahui penyebab penurunan tersebut.

Garuda Keadilan dibentuk sebagai wadah pembinaan dan silaturahmi anak kader, dengan harapan dapat merangkul generasi muda untuk melanjutkan perjuangan dan menjaga nilai-nilai yang telah dirintis oleh orang tua mereka. Dengan fungsi tersebut, GK memiliki peran penting dalam proses regenerasi serta keberlanjutan kaderisasi di lingkungan Partai Keadilan Sejahtera. Seiring berjalannya waktu, dinamika organisasi tentu dapat mengalami perubahan, termasuk dalam tingkat keaktifan kader. Meskipun penurunan aktivitas tidak serta-merta menunjukkan kegagalan organisasi, kondisi ini perlu diperhatikan karena dapat memengaruhi optimalisasi fungsi pembinaan dan regenerasi yang menjadi tujuan awal pembentukannya. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi tingkat keaktifan kader tersebut, sehingga hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan ke depan agar organisasi dapat terus berkembang dan menjalankan perannya secara maksimal sesuai dengan tujuan awal pembentukannya.

Penulis berpendapat penurunan jumlah anggota GK dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik eksternal maupun internal. Faktor eksternal seperti pengaruh sosial yang dapat memengaruhi minat pemuda sehingga sebagian kader muda lebih fokus pada aktivitas di luar organisasi, terpengaruh tren media sosial atau bahkan memiliki kesibukan lain yang mengurangi keterlibatan mereka. Faktor internal bisa pada program kaderisasi dan pembinaan yang kurang menarik, komunikasi antar anggota yang kurang efektif, maupun hubungan yang kurang harmonis antara anggota dan pengurus,

dapat menyebabkan sebagian kader merasa kurang terlibat dan akhirnya tidak aktif. Kondisi ini penting diperhatikan, karena kader muda Garuda Keadilan memegang peran strategis sebagai regenerasi kepemimpinan dan keberlanjutan visi-misi Partai Keadilan Sejahtera.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penurunan jumlah anggota Garuda Keadilan di Provinsi Lampung, oleh karena itu peneliti menetapkan judul “Faktor Faktor yang Mempengaruhi Menurunnya Kader Garuda Keadilan (Studi Garuda Keadilan Sayap Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Lampung Tahun 2024)”. Selain itu, peneliti juga menelusuri sejumlah studi terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Tujuannya adalah untuk memperoleh bahan perbandingan, memperkaya referensi, serta menjadi acuan dalam mengembangkan ide, memperkuat landasan teori, dan membangun kerangka berpikir yang mendukung pelaksanaan penelitian. Studi sebelumnya mencakup:

Penelitian pertama dilakukan oleh Syahara Bhatari Alamsyah dan Hendra (2023) dengan judul Peran Sayap Kepemudaan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Generasi Milenial dan Generasi Z di Indonesia. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana peran sayap kepemudaan Partai Keadilan Sejahtera dalam meningkatkan partisipasi politik generasi milenial dan generasi z. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui studi Pustaka dan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Partai Keadilan Sejahtera memiliki tiga organisasi sayap kepemudaan (PKS Muda, Gema Keadilan, dan Garuda Keadilan) yang berperan dalam melakukan pendidikan politik, menyalurkan ekspresi dan aspirasi, mewarnai aktivitas partai, dan meningkatkan kreativitas generasi muda. PKS Muda, khususnya memanfaatkan media sosial untuk menyuarakan gagasan politik, mendukung kandidat, dan mengkritisi lawan politik. Gema Keadilan berupaya meningkatkan partisipasi politik melalui pembentukan organisasi dan seminar, sementara Garuda Keadilan berfokus pada optimalisasi peran pemuda sesuai

passion dan skill mereka melalui pendidikan dan sosialisasi. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam ruang lingkup, yaitu hanya fokus pada satu wilayah yaitu Bandar Lampung sehingga belum menggambarkan secara menyeluruh dinamika Garuda Keadilan di daerah lain. Teori yang digunakan dalam penelitian tersebut mengacu pada konsep organisasi kepemudaan sebagai sarana pembentukan karakter dan peningkatan partisipasi sosial-politik generasi muda.

Penelitian kedua dilakukan oleh Soraya dkk., (2025) dengan judul Peran Organisasi Kepemudaan sebagai Wadah Generasi Muda: Studi Kasus Garuda Keadilan Bandar Lampung. Tujuan dari penelitian tersebut untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana Garuda Keadilan (GK) sebagai organisasi kepemudaan yang berafiliasi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), menjalankan peran strategisnya dalam membina kader muda yang memiliki pemahaman politik, karakter, kemandirian, dan integritas. Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui observasi langsung dan wawancara mendalam dengan Ketua PKS Muda cabang Bandar Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Garuda Keadilan menerapkan pembinaan bertahap melalui program penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kader, serta menggunakan pendekatan inovatif seperti sekolah politik, pelatihan *soft skill*, mentoring, dan pemanfaatan media sosial. Penelitian tersebut menegaskan peran penting organisasi kepemudaan dalam menyiapkan generasi muda yang adaptif terhadap perubahan sosial-politik.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Shoffi Silva Salsabilla (2025) dengan judul Pola Kaderisasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Pengembangan Kader Muda di Provinsi Lampung. Tujuan dari penelitian tersebut untuk mengetahui bagaimana pola kaderisasi PKS dalam mengembangkan kader muda di wilayah lampung. Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kaderisasi Partai Keadilan Sejahtera berlangsung secara sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan, dimulai dari program “PKS Menyapa”, kemudian rekrutmen melalui Kartu Tanda

Anggota (KTA), hingga pembinaan di Unit Pembinaan Anggota (UPA) yang berbasis Kurikulum Kaderisasi Partai Anggota (KKP) serta evaluasi melalui Indikator Capaian (IC). Penelitian ini juga menemukan adanya hambatan, seperti terbatasnya jaringan kader Garuda Keadilan (GK) dan citra organisasi yang eksklusif hanya untuk anak kader, yang mengurangi daya tarik bagi pemuda di luar lingkungan partai. Teori yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah teori pola pembinaan kader dari Syamsudin Haris dkk., yang mencakup enam elemen pokok: tata norma, rekrutmen terbuka, evaluasi kader, jaringan kerja kader, *affirmative action*, dan pembinaan kader perempuan.

Penelitian keempat dilakukan oleh Muhammad Rizky Al-Farizi dkk., (2025) dengan judul Melihat Peran Organisasi Garuda Keadilan Lampung dalam Membentuk Karakter dan Kesadaran Sosial Politik Generasi Muda. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Garuda Keadilan Lampung aktif dalam menyelenggarakan kegiatan Pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan, dan aksi sosial yang bertujuan membentuk pemuda yang berintegritas, kritis, serta berkomitmen pada nilai-nilai kebangsaan dan demokrasi. Garuda Keadilan juga berperan sebagai ruang partisipasi dan pembinaan untuk mencetak pemuda sebagai kekuatan moral, control sosial, dan agen perubahan.

Hasil penelusuran penelitian terdahulu telah membahas Garuda Keadilan dari aspek peran, pembinaan, dan pola kaderisasi secara umum. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik mengkaji penurunan kader Garuda Keadilan. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengisi celah penelitian yang belum banyak dikaji, dengan menelaah secara khusus faktor-faktor yang memengaruhi penurunan aktivitas kader Garuda Keadilan di Provinsi Lampung.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, perumusan masalah dalam penelitian adalah “Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi menurunnya aktivitas kader muda Garuda Keadilan Provinsi Lampung?”

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, yaitu mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi menurunnya aktivitas kader Garuda Keadilan Provinsi Lampung.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam dua bentuk, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ilmu politik, khususnya mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penurunan kader muda pada organisasi sayap partai politik. Temuan dari penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur ilmiah serta menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang mengangkat isu serupa.
2. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat membantu Garuda Keadilan dan Partai Keadilan Sejahtera dalam mempertahankan dan meningkatkan keaktifan kader muda.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Partai Politik

2.1.1 Definisi Partai Politik

Partai politik merupakan sekumpulan individu yang terorganisasi dan memiliki kesamaan pandangan serta tujuan terkait penyelenggaraan pemerintahan (Hermansyah. 2020). Budiardjo, M. (2008) menjelaskan partai politik adalah organisasi yang anggotanya memiliki tujuan dan nilai yang sama, dengan tujuan utama meraih kekuasaan politik secara konstitusional untuk melaksanakan program-programnya. Menurut (Carl J. Friedrich dalam Saleh, 2018) menjelaskan partai politik dapat diartikan sebagai organisasi tetap yang dibentuk untuk memperoleh serta mempertahankan kendali atas pemerintah bagi kepentingan para pemimpin. Melalui kekuasaan, tersebut, partai memberikan manfaat kepada para anggotanya, baik yang bersifat ideal maupun materil.

Partai politik merupakan organisasi yang bersifat nasional yang didirikan atas dasar sukarela oleh warga negara Indonesia yang berbagi tujuan dan cita-cita bersama. Keberadaannya berfungsi untuk memperjuangkan dan melindungi kepentingan politik anggotanya, masyarakat, serta bangsa dan negara, sekaligus menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 (Utama, 2023). Partai politik merupakan salah satu sarana yang berfungsi menjembatani hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang memiliki tujuan tertentu serta berupaya meraih kekuasaan untuk mewujudkan tujuan tersebut (Shoffi, 2025). Menurut Sigmund Neumann, partai politik merup-

akan organisasi yang terdiri atas para aktivis politik yang berupaya memperoleh kekuasaan pemerintahan dengan cara merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan kelompok lain yang memiliki pandangan berbeda (dalam Fales, S. 2018).

Anthony Downs mendefinisikan partai politik dalam pengertian luas sebagai suatu koalisi individu yang berupaya menguasai aparat pemerintahan melalui mekanisme yang sah. Koalisi dipahami sebagai kelompok individu yang memiliki kesamaan tujuan dan bersepakat untuk bekerja sama dalam mencapainya. Sementara itu, aparat pemerintahan merujuk pada perangkat hukum, fisik, maupun kelembagaan yang berfungsi sesuai dengan pembagian tugas. Sedangkan yang dimaksud secara institusional (dalam Ropii. 2019). Secara normatif, partai politik merupakan organisasi yang bersifat nasional dan didirikan oleh sekelompok warga negara secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak serta cita-cita. Tujuannya adalah memperjuangkan dan melindungi kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, sekaligus menjaga keutuhan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Omara, A. 2019).

Berdasarkan berbagai pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa partai politik dapat dipahami sebagai organisasi yang dibentuk secara sukarela oleh sekelompok warga negara dengan tujuan memperjuangkan kepentingan politik, memperoleh atau mempertahankan kekuasaan secara konstitusional, serta menyalurkan aspirasi masyarakat dalam sistem demokrasi.

2.1.2 Fungsi Partai Politik

Menurut Budiardjo (2008), dalam sistem demokrasi partai politik menjalankan beberapa fungsi utama, yaitu:

1. Sebagai sarana komunikasi politik, partai politik berfungsi menjembatani hubungan antara masyarakat dengan pemerintah. Bagi

pemerintah, partai menjadi alat untuk mendengar aspirasi rakyat, sedangkan bagi masyarakat partai menjadi saluran untuk menyuarakan pendapat dan gagasan.

2. Sarana sosial politik dapat dipahami sebagai mekanisme yang mengarahkan pada pembentukan sikap dan orientasi individu terhadap fenomena politik yang terjadi di lingkungannya dikenal dengan istilah sosialisai politik. Melalui mekanisme tersebut, nilai, norma, dan prinsip politik diwariskan masyarakat kepada generasi berikutnya. Dengan demikian, sosialisasi politik memegang peranan penting dalam pembentukan budaya politik negara.
3. Sarana rekrutmen politik berhubungan langsung dengan proses pemilihan pemimpin, baik dalam lingkup internal partai maupun di tingkat nasional. Setiap partai dituntut memiliki kader yang mumpuni, sebab melalui kader yang berkualitas partai dapat memperkuat posisi dan peluangnya untuk berkembang. Dengan demikian, keberadaan kader yang baik akan memudahkan partai menentukan kepemimpinannya sekaligus memberi kesempatan untuk mencalonkan wakilnya dalam arena kepemimpinan nasional.
4. Sarana Pengatur Konflik Partai politik memiliki fungsi penting dalam meredam dan mengatur potensi konflik yang timbul di tengah masyarakat yang majemuk. Perbedaan etnis, agama, maupun kepentingan sosial-ekonomi kerap melahirkan beragam tuntutan dari kelompok masyarakat. Dalam hal ini, partai politik berperan sebagai perantara antara rakyat dengan pemerintah, sekaligus menyatukan berbagai aspirasi yang berbeda. Melalui proses ini, partai dapat menjaga stabilitas politik dan memastikan bahwa perbedaan yang ada tetap disalurkan secara konstruktif dalam sistem demokrasi.

Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (dalam Abdulhadi, D. 2019) fungsi partai politik adalah:

1. Memberikan pendidikan politik kepada anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara yang memahami serta menyadari hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
2. Mewujudkan lingkungan yang harmonis guna memperkuat persatuan serta kesatuan bangsa indonesia demi tercapainya kesejahteraan masyarakat;
3. Berperan sebagai sarana untuk menampung, menghimpun, dan menyalurkan aspirasi politik masyarakat dalam proses perumusan hingga penetapan kebijakan negara;
4. Mendorong dan memfasilitasi partisipasi politik warga negara indonesia; dan
5. Menyelenggarakan rekrutmen politik dalam rangka pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokratis dengan tetap memperhatikan prinsip kesetaraan dan keadilan gender.

2.1.3 Kaderisasi Politik

Kaderisasi adalah proses membina dan menyiapkan seseorang agar dapat melanjutkan peran serta tanggung jawab dalam partai atau organisasi. Kaderisasi pada partai politik lebih bersifat sebagai proses pembinaan yang dilakukan oleh partai untuk meningkatkan kemampuan individu anggotanya, sehingga mereka mampu menjalankan peran dan fungsi partai secara efektif (Irawan, Y. 2020). Menurut Mangkubumi kaderisasi adalah proses yang terus berjalan dan berkembang secara bertahap. Proses ini terdiri dari tiga bagian utama. Pertama, pendidikan kader, yaitu memberikan berbagai pengetahuan yang dibutuhkan oleh kader. Kedua, penugasan kader, dimana mereka diberi kesempatan untuk ikut serta dalam kegiatan organisasi sebagai bentuk latihan agar semakin dewasa dan matang. Ketiga, pengembangan karir kader, yaitu memberi mereka tanggung jawab yang lebih besar sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki, agar bisa berperan lebih luas dalam perjuangan organisasi (Syahputra & Darmansah. 2020).

Kaderisasi memegang peranan penting dalam suatu organisasi karena merupakan upaya sistematis untuk membentuk integritas kepribadian serta mengembangkan kemampuan individu dalam memimpin dan mempengaruhi orang lain secara efektif. Melalui proses ini, organisasi dapat mempersiapkan kader-kader yang memiliki potensi untuk menjadi pemimpin di masa depan, sekaligus meneruskan estafet perjuangan dan keberlanjutan arah organisasi (Harahap, 2017). Kaderisasi merupakan proses pembentukan kader yang dilakukan secara berkelanjutan dan terstruktur dalam suatu organisasi, biasanya mengikuti panduan kurikulum, silabus, atau mahaj tertentu. Secara umum, kaderisasi dipahami sebagai proses pendidikan jangka panjang yang bertujuan mengoptimalkan potensi internal seorang kader melalui penanaman dan pewarisan nilai-nilai organisasi. Proses ini diharapkan dapat melahirkan kader-kader yang tangguh, bertanggung jawab, serta mampu melanjutkan estafet kepemimpinan dan merealisasikan tujuan organisasi. Setiap individu yang berpotensi menjadi kader partai politik akan melewati proses kaderisasi, yakni suatu bentuk pendidikan politik yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Proses ini bertujuan untuk menanamkan pemahaman yang komprehensif mengenai platform, sejarah, arah perjuangan, serta strategi politik partai, sekaligus membentuk militansi kader terhadap partai (Siregar, 2020).

Kaderisasi adalah proses pembinaan yang dilakukan secara terstruktur, bertahap, dan berkelanjutan oleh sebuah organisasi atau partai politik untuk menyiapkan individu agar mampu menjalankan peran, fungsi, dan tanggung jawab organisasi secara efektif. Proses ini mencakup pendidikan, pelatihan, penugasan, serta pengembangan kapasitas dan ideologi, dengan tujuan membentuk kader yang memiliki integritas, kapabilitas, loyalitas, serta kesiapan untuk melanjutkan estafet kepemimpinan dan mewujudkan visi-misi organisasi.

Syamsuddin Haris dkk (2016:53-54), mengatakan kaderisasi bertujuan untuk memperkuat pemahaman kader terhadap nilai-nilai dasar, ideologi serta arah perjuangan partai politik. Ideologi menjadi pondasi penting dalam membentuk visi dan misi partai serta mengarahkan langkah-langkah perjuangan politiknya. Melalui kaderisasi, anggota partai dikenalkan pada ideologi partai secara menyeluruh agar memiliki pemahaman dan kesadaran ideologis yang kuat. Ideologi sendiri merupakan sistem gagasan yang terorganisir, berfungsi sebagai pedoman bagi kelompok masyarakat atau negara dalam mencapai tujuannya, seperti liberalisme, sosialisme, konservatisme, Pancasila, atau Islamisme. Selain memperkuat ideologisasi, kaderisasi juga berfungsi dalam menanamkan militansi pada kader, salah satunya melalui proses visioning, yaitu internalisasi nilai dan orientasi perjuangan partai secara berkesinambungan. Kaderisasi tidak hanya bertumpu pada pembentukan loyalitas ideologis, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan kapasitas kader dalam pengelolaan partai politik serta mempersiapkan mereka untuk menduduki posisi publik strategis, seperti di parlemen atau birokrasi pemerintahan. Dalam hal ini, kader dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang relevan agar mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab secara profesional.

Menurut (Harahap dalam Sartika, Y. 2024) kaderisasi dalam partai politik dilakukan melalui dua bentuk, yaitu kaderisasi informal dan kaderisasi formal.

1. Kaderisasi Informal

Kaderisasi informal adalah proses pembinaan yang dilakukan tanpa perencanaan atau kurikulum yang terstruktur. Proses ini berlangsung secara alami dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Fokus utamanya adalah membentuk karakter kader melalui pembiasaan nilai-nilai moral, sikap positif, dan akhlak mulia sejak dini. Melalui proses ini, partai dapat menilai kepribadian kader, termasuk potensi, kelemahan, dan riwayat organisasinya.

Kaderisasi informal juga diharapkan mampu mengoreksi sikap negatif kader dan menggantinya dengan perilaku yang lebih baik.

2. Kaderisasi Formal

Kaderisasi formal merupakan pembinaan yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan mengikuti kurikulum serta aturan yang berlaku dipartai politik. Tujuan utamanya adalah menyiapkan kader menjadi calon pemimpin melalui pendidikan, pelatihan, dan penugasan yang terstruktur. Bentuk pelaksanaannya meliputi pemberian jabatan pendamping pimpinan, pelatihan internal maupun eskternal, keterlibatan dalam program kepemimpinan, dan penugasan yang mendorong kader untuk terus belajar dan berkembang.

Syamsuddin Haris, dkk (2016) membagi model kaderisasi, sebagai berikut:

1. Kaderisasi untuk Anggota Partai Politik

Secara umum, partai politik menyelenggarakan kaderisasi yang ditujukan bagi anggota internalnya. Dalam partai modern, setiap anggota yang terdaftar serta rutin membayar iuran dalam jangka waktu tertentu secara otomatis akan terlibat dalam program pelatihan yang disiapkan partai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Proses kaderisasi ini menjadi bagian dari perlembagaan partai untuk membentuk kader yang sejalan dengan visi dan misi organisasi politik tersebut. Kegiatan ini dijalankan secara terencana, bertahap, dan berkesinambungan dalam periode waktu tertentu.

2. Kaderisasi untuk Non Anggota Partai

Organisasi sayap partai merupakan salah satu elemen penting dalam proses kaderisasi partai politik. Melalui keberadaan sayap partai, proses penanaman ideologi serta pembentukan karakter kader yang militan dapat dilakukan dengan lebih efektif dibandingkan kaderisasi yang bersumber dari organisasi masyarakat lainnya. Hal ini disebabkan karena organisasi sayap adalah bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari struktur partai politik itu sendiri. Organisasi sayap turut berkontribusi besar terhadap partai, baik dalam pelaksanaan,

sosialisasi, maupun penyebaran program dan kebijakan partai kepada masyarakat. Bentuk organisasi sayap ini bisa mencakup organisasi pemuda, mahasiswa, perempuan, profesi, maupun berbasis keagamaan. Kaderisasi dalam organisasi sayap juga berfungsi sebagai upaya perluasan basis pendukung partai. Organisasi sayap dibentuk dan diberdayakan oleh partai politik sebagai sarana strategis untuk menarik simpati serta memperoleh dukungan dari masyarakat, baik dalam konteks kemenangan pemilu maupun dalam rangka penyebarluasan kebijakan partai.

Menurut Syamsuddin Haris dkk (2016:52), proses kaderisasi dalam partai politik ideal perlu berlandaskan pada tiga prinsip utama, yaitu terbuka, non-diskriminatif, dan berjenjang.

1. Terbuka

Kaderisasi yang terbuka memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh anggota partai untuk mengikuti pelatihan dan kegiatan pembinaan lainnya, tanpa diskriminasi. Hal ini menegaskan bahwa semua anggota, termasuk dari sayap kepemudaan partai yang memiliki potensi, dapat mengikuti jenjang kaderisasi sesuai dengan ketentuan partai. Proses ini juga menuntut adanya persaingan yang sehat dan transparan, bebas dari praktik kolusi dan nepotisme, guna menghasilkan kader yang kompeten dan berkualitas.

2. Non-Diskriminatif

Prinsip non-diskriminatif menekankan pentingnya kesetaraan akses dalam kaderisasi, tanpa membedakan latar belakang ras, agama, jenis kelamin, suku, atau golongan. Melalui pendekatan ini, kaderisasi tidak hanya menjamin inklusivitas, tetapi juga membantu mengurangi dominasi kelompok tertentu atau praktik oligarki dalam perebutan posisi strategis, baik di tingkat partai maupun jabatan publik.

3. Berjenjang

Kaderisasi dilakukan secara bertahap melalui model piramidal, dimulai dari jenjang dasar, menengah, hingga lanjut. Setiap tahapan

dirancang untuk menyesuaikan dengan tingkat penguasaan materi dan kesiapan kader dalam menjalankan fungsi-fungsi organisasi. Selain sebagai proses pembinaan, penjenjangan ini juga menjadi syarat dalam pencapaian karir politik di dalam partai, karena setiap posisi strategis memiliki prasyarat jenjang kaderisasi tertentu yang harus ditempuh oleh kader.

Setelah memahami konsep, tujuan, dan tahapan kaderisasi politik secara umum, penelitian ini menggunakan teori kaderisasi politik dari Syamsuddin Haris, dkk., (2016) untuk menganalisis sejauh mana sistem pembinaan kader berjalan serta bagaimana pelaksanaannya memengaruhi menurunnya keaktifan kader Garuda Keadilan di Provinsi Lampung. Berdasarkan pandangan Haris dkk., (2016), partai harus menciptakan pola pembinaan kader yang terprogram, terukur, sistematis, dan komprehensif mencakup:

1. Adanya tata norma, aturan dan tata institusi dalam membentuk sistem pengkaderan, baik pengkaderan umum dan pengkaderan khusus;
2. Adanya model rekrutmen yang terbuka dan demokratis;
3. Terdapatnya sistem evaluasi pembinaan kader yang berkesinambungan;
4. Membentuk jaringan kerja kader melalui interaksi antar kader demi meningkatkan kualitas kader agar lahir kader-kader yang loyal dan berdedikasi tinggi;
5. Perlu dilakukan *affirmative action* dalam merekrut dan melakukan pola pembinaan perempuan kader partai guna mencapai meningkatkan jumlah perempuan dalam partai politik, parlemen, maupun jabatan-jabatan publik. Selain itu kaderisasi pada kelompok perempuan juga berarti meningkatkan kemampuan dan keterampilan Perempuan terkait dengan peran yang dimainkan dalam partai politik, parlemen dan jabatan publik lainnya; dan

6. Model pembinaan perempuan kader partai, baik dari segi strategi pembinaan, materi pembinaan maupun metode pembinaan hendaknya dikembangkan dan sesuai dengan kebutuhan.

2.2 Hubungan Sayap Partai dengan Partai Politik

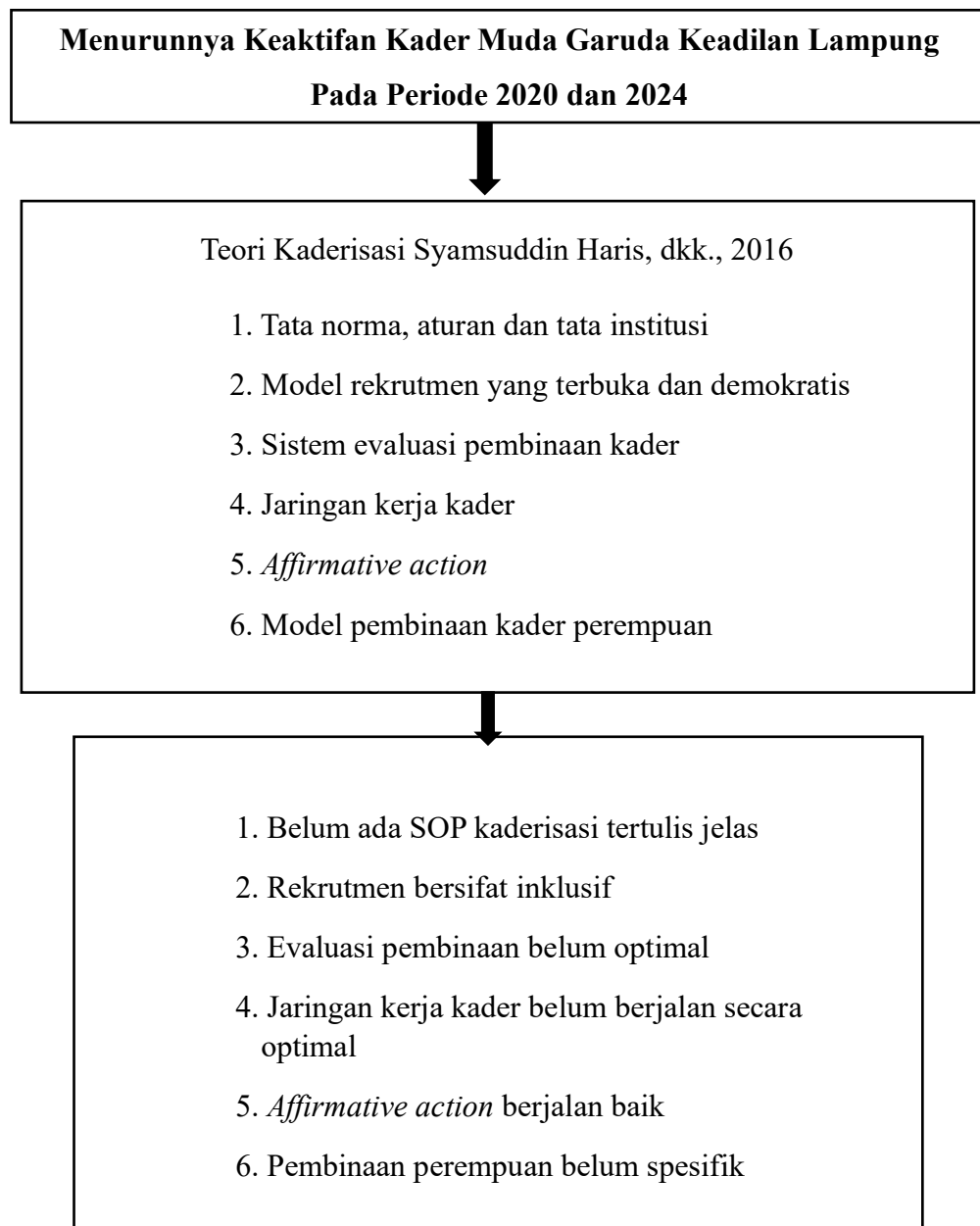
Hubungan antara organisasi sayap partai dan partai politik bersifat sangat erat dan saling melengkapi. Organisasi sayap berperan sebagai penghubung yang memungkinkan partai politik menjangkau berbagai segmen masyarakat, termasuk pemuda, buruh, perempuan dan petani, yang biasanya menjadi basis dukungan partai. Selain itu, organisasi sayap memiliki peran aktif dalam membina, mengembangkan, dan memberdayakan komunitas masing-masing sesuai karakter, kebutuhan, dan permasalahan yang ada. Misalnya, organisasi pemuda harus mampu mengenali potensi, kebutuhan, serta tantangan yang dihadapi komunitas pemuda, sekaligus merancang strategi dan langkah efektif untuk mengatasinya. Hal ini menjadi sangat penting, khususnya dalam konteks kemenangan pemilu, mengingat kelompok pemilih muda merupakan basis suara strategis yang perlu mendapat perhatian serius oleh partai politik untuk meraih kemenangan dalam pemilu maupun pilkada di berbagai daerah. Dengan demikian, organisasi sayap tidak hanya berfungsi sebagai wadah partisipasi, tetapi juga sebagai instrumen strategis bagi partai untuk memperkuat basis massa dan meningkatkan efektivitas mobilisasi politik (Aprizon, dkk. 2023).

Dengan demikian, organisasi sayap partai dan partai politik membangun hubungan yang saling menguntungkan, layaknya simbiosis mutualisme. Bagi partai politik, terutama menjelang pemilu, organisasi sayap partai berperan sebagai sarana untuk meraih dukungan politik. Hal ini disebabkan posisi organisasi sayap partai yang strategis bagi partai induknya, serta karena organisasi sayap partai relatif bebas dari praktik-praktik politik kotor yang kadang dilakukan oleh sebagian elit partai.

Salah satu partai politik yang memiliki organisasi sayap adalah Partai Keadilan Sejahtera, partai tersebut dinilai memiliki strategis yang baik dalam menyeleksi calon kadernya. Partai Keadilan Sejahtera membentuk Garuda Keadilan sebagai organisasi sayap partai politik sekaligus sebagai upaya untuk mengelola kualitas sumber daya politiknya. Garuda keadilan yang resmi berdiri pada 28 Maret 2012 lahir dari keresahan para orang tua terhadap kondisi generasi muda pada saat itu (Syukur, A. 2024). Garuda Keadilan juga berfungsi sebagai ruang berkumpul bagi pemuda muslim terutama anak-anak kader, untuk menumbuhkan kembali semangat kepedulian terhadap perjuangan dakwah. Garuda Keadilan sering disebut sebagai tempat nongkrongnya pemuda dan pemudi Islam, karena suasana yang dibangun didalamnya menjunjung tinggi kenyamanan dan keakraban (Soraya, D. dkk.2025).

2.3 Kerangka Pikir

Penulis memulai kerangka pemikiran dengan masalah menurunnya keaktifan kader muda Garuda Keadilan Lampung pada periode 2020 dan 2024. Objek kajian pada penelitian ini adalah Garuda Keadilan Provinsi Lampung. Penulis tertarik meneliti penurunan jumlah keaktifan kader karena menunjukkan adanya tantangan dalam proses kaderisasi yang dijalankan Garuda Keadilan. Untuk memahami hal tersebut, penulis menggunakan teori kaderisasi dari Syamsuddin Haris, dkk., 2016 yang menjelaskan bahwa proses kaderisasi dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti adanya aturan dan sistem yang jelas, rekrutmen yang terbuka, pembinaan dan evaluasi kader yang berkelanjutan, pembentukan jaringan kader, serta perhatian terhadap kader muda dan perempuan.



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2025

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif, data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka (Sugiyono, 2017). Penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang berfokus pada fenomena atau gejala yang terjadi secara alami. Pendekatan ini bersifat mendasar dan naturalistik, sehingga pelaksanaannya tidak dapat dilakukan di laboratorium, melainkan langsung di lapangan (Abdussamad, 2021). Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk memahami dan menggali fenomena yang terjadi pada objek penelitian, sehingga diperoleh wawasan yang mendalam serta dapat menemukan hal-hal yang bersifat unik (Sugiyono, 2022).

Pemilihan penelitian kualitatif dalam penelitian ini didasarkan karena secara alamiah mampu memberikan pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial yang bersifat kontekstual. Penelitian kualitatif bertujuan memahami makna dan pandangan subjek secara holistik dalam konteks yang alamiah. Metode ini sesuai dengan tujuan penelitian untuk menelaah faktor-faktor yang memengaruhi penurunan jumlah keaktifan kader Garuda Keadilan di Provinsi Lampung melalui eksplorasi pengalaman dan persepsi kader serta pengurus. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi nyata secara sistematis tanpa menguji hipotesis, sehingga hasil penelitian dapat menjelaskan realitas sosial sebagaimana adanya.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi objek kajian sehingga peneliti tidak terjebak pada banyaknya data di lapangan dan dapat menghindari pengumpulan informasi yang tidak relevan dengan permasalahan maupun tujuan penelitian. Menurut Sugiyono (2017), fokus dalam penelitian kualitatif bersifat *holistic* (menyeluruh) sehingga penetapan penelitian kualitatif dilakukan berdasarkan keseluruhan situasi sosial yang diteliti, meliputi unsur tempat (*place*), pelaku (*actor*), dan aktivitas (*activity*) yang saling berinteraksi secara sinergis.

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan yang hendak dicapai, penelitian ini difokuskan mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi menurunnya jumlah kader Garuda Keadilan dengan menggunakan teori penelitian ini menggunakan teori kaderisasi Syamsuddin Haris, dkk., (2016).

1. Adanya tata norma, aturan dan tata institusi dalam membentuk sistem pengkaderan, baik pengkaderan umum dan pengkaderan khusus.
 - a) Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP), keberadaan SOP harus tertulis jelas dalam mengatur proses kaderisasi, mulai dari perekrutan, pelatihan, hingga pengembangan kader.
 - b) Pengaturan aturan dan etika dalam proses pengkaderan yang digunakan untuk mengatur perilaku dan norma kader, serta aturan disiplin yang berlaku selama proses pengkaderan.
2. Adanya model rekrutmen yang terbuka dan demokratis.
 - a) Transparansi dalam proses rekrutmen semua informasi yang berkaitan dengan standar seleksi, proses seleksi, dan hasil seleksi diumumkan secara terbuka kepada publik.
 - b) Prosedur seleksi yang jelas dan terbuka menggunakan mekanisme yang objektif dan adil, misalnya melalui ujian tertulis, wawancara atau uji kompetensi, dan tidak bergantung pada koneksi pribadi atau nepotisme.
3. Terdapatnya sistem evaluasi pembinaan kader yang berkesinambungan.

- a) Adanya rencana dan program pembinaan yang jelas. Kader harus memahami tujuan pelatihan dan tahapan yang harus mereka lalui. Program pelatihan harus memiliki tujuan yang terukur dan realistis.
 - b) Pemantauan indikator jangka panjang. Pembinaan kader dievaluasi tidak hanya selama program, tetapi juga dalam jangka panjang untuk mengetahui apakah hasil pelatihan membawa perubahan signifikan pada organisasi atau komunitas.
4. Membentuk jaringan kerja kader melalui interaksi antar kader demi meningkatkan kualitas kader agar lahir kader-kader yang loyal dan berdedikasi tinggi.
- a) Interaksi antar kader. Melihat seberapa sering kader berinteraksi satu sama lain, baik melalui pertemuan formal maupun informal. Interaksi dapat menjadi salah satu tolak ukur dalam memperkuat jaringan kerja kader.
 - b) Tingkat keterlibatan dalam aktivitas bersama kader yang terlibat dalam berbagai kegiatan organisasi, seperti pelatihan, seminar, dan proyek bersama.
5. Perlu dilakukan *affirmative action* dalam merekrut dan melakukan pola pembinaan perempuan kader partai guna mencapai meningkatkan jumlah perempuan dalam partai politik, parlemen, maupun jabatan-jabatan publik. Selain itu kaderisasi pada kelompok perempuan juga berarti meningkatkan kemampuan dan keterampilan Perempuan terkait dengan peran yang dimainkan dalam partai politik, parlemen dan jabatan publik lainnya.
- a) Kebijakan kuota gender, adanya kebijakan kuota khusus untuk perempuan dalam daftar calon anggota parlemen, jabatan publik, atau dalam struktur partai. Minimal 30% dari posisi strategis di partai atau parlemen diisi oleh perempuan.
6. Model pembinaan perempuan kader partai, baik dari segi strategi pembinaan, materi pembinaan maupun metode pembinaan hendaknya dikembangkan dan sesuai dengan kebutuhan.

- a) Pembinaan kader Perempuan melalui strategi pada fokus peningkatan kapasitas kepemimpinan, keterampilan, dan kemandirian.
- b) Partisipatif dan dialogis, menggunakan metode diskusi kelompok atau studi kasus untuk mendorong keterlibatan aktif kader perempuan.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat berlangsungnya penelitian. Penentuan Lokasi penting agar objek dan tujuan penelitian jelas, sehingga memudahkan penulis dalam melakukan penelitian (Wibawa, L., 2022). Penelitian ini dilakukan di Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Provinsi Lampung yang beralamat di jalan Untung Suropati No.3, Kp. Baru, Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung. Alasan memilih lokasi penelitian ini didasarkan karena Garuda Keadilan merupakan organisasi sayap Partai Keadilan Sejahtera, yang mana dalam struktur partai, Partai Keadilan Sejahtera memiliki lembaga kepemimpinan tingkat provinsi yang disebut DPTW (Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah) yang terdiri dari MPW (Majelis Pertimbangan Wilayah) DPW (Dewan Pengurus Wilayah) dan DSW (Dewan Syariah Wilayah) dari ketiganya DPW berperan dalam mengordinasi, membina, serta melaksanakan program partai termasuk kegiatan kaderisasi dan pembinaan organisasi sayap seperti Garuda Keadilan.

3.4 Informan Penelitian

Informan berperan penting dalam menyediakan data dan informasi yang relevan bagi penelitian. Dalam penelitian kualitatif informan, yaitu individu yang memberikan keterangan mengenai situasi penelitian dan berperan penting dalam menyediakan data yang relevan (Meleong dalam Khosiah, K. dkk. 2019).

Dalam penelitian ini yang diambil adalah mereka yang mengetahui dan memahami Gambaran aktivitas maupun organisasi Garuda Keadilan, yang berperan penting dalam memberikan atau menyediakan data yang relevan dengan penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah:

Tabel 3.1 Informan Peneliti

No.	Nama	Jabatan
1.	M. Fajar Ghosyiah Zain, S.Pd., CPS	Ketua Umum Garuda Keadilan
2.	Damayanti, S.Pd., M.Pd.	Sekretaris Bidang Kaderisasi PKS
3.	Dila	Kader Aktif GK
4.	Ayu	Kader Tidak Aktif GK
5.	Himawan Indrajat, S.IP., M.Si.	Pengamat Politik
6.	Bella Ibnaty Sardio, S.Mat	Redaktur Pelaksana Lampung Geh

3.5 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber data utama yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan kepada Ketua Garuda Keadilan PKS Lampung, serta anggota aktif dan tidak aktif Garuda Keadilan. Berdasarkan penelitian sumber data dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu, data primer dan data sekunder (Sulung dan Muspawi, 2024).

1. Data Primer

Data primer adalah informasi utama yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber asli, seperti informan, melalui metode wawancara. Data primer memiliki sejumlah karakteristik yang menjadikannya penting dalam suatu penelitian. Pertama, data primer masih berupa informasi mentah yang belum mengalami pengolahan, sehingga memberikan peluang bagi peneliti untuk melakukan interpretasi secara lebih tepat dan sesuai dengan tujuan penelitian. Kedua, data primer diperoleh langsung dari sumber asli, sehingga dapat penafsiran maupun distorsi informasi.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber yang sudah ada sebelumnya, seperti dokumen, literatur, atau catatan pihak lain. Data ini berfungsi untuk melengkapi data primer, memberikan dasar teoritis, serta memperkuat temuan penelitian.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga metode, yaitu dokumen, observasi, dan wawancara. Menurut (Yusuf, M. 2014), Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yaitu:

1. Wawancara

Yusuf, M. 2014, wawancara adalah Teknik pengumpulan data melalui interaksi langsung antara pewawancara dan narasumber dalam bentuk percakapan tatap muka. Teknik observasi sering digabungkan dengan wawancara mendalam dengan tujuan untuk menggali informasi yang lebih akurat. Wawancara digunakan untuk menggali pandangan, pengalaman, dan persepsi kader muda serta pengurus Garuda Keadilan terkait penurunan jumlah kader Garuda Keadilan.

2. Dokumentasi

Dokumen adalah catatan atau karya yang memuat informasi tentang peristiwa yang sudah terjadi, seperti tulisan, foto, gambar, artefak, Riwayat hidup, biografi, atau karya seni (Yusuf, M. 2014). Dalam penelitian kualitatif, dokumen membantu melengkapi hasil wawancara dan observasi, menjadi bukti pendukung serta dokumen memudahkan peneliti karena dapat diperoleh tanpa selalu melakukan pengumpulan data langsung dilapangan, sekaligus menambah sudut pandang dalam penelitian.

3.7 Teknik Pengolahan Data

Setelah data berhasil dikumpulkan, Langkah berikutnya adalah melakukan proses pengolahan data. Dalam penelitian ini, pengolahan data menurut Sugiyono (2018) mencakup beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Editing Data

Editing merupakan proses pemeriksaan ulang terhadap data yang telah diperoleh guna memastikan kelengkapan, kesiapan, kejelasan, kesesuaian, serta keseragaman data. Data yang dianggap tidak relevan atau tidak diperlukan akan dihilangkan. Data hasil wawancara maupun dokumentasi

kemudian diedit agar sesuai dengan kebutuhan penelitian. Hasil wawancara diperbaiki agar lebih sistematis, dan dokumen yang dipilih adalah yang benar-benar lengkap dan hanya digunakan apabila mendukung hasil penelitian.

2. Interpretasi Data

Pada tahap ini, peneliti memberikan pemahaman atau pandangan teoritis terhadap data yang telah diperoleh. Proses interpretasi dilakukan untuk menggali makna sekaligus memperoleh hasil penelitian (Sugiyono, 2018). Tahap interpretasi data berguna untuk menyajikan penjelasan yang lebih mendalam dalam bentuk deskriptif maupun naratif. Data yang telah diperoleh kemudian ditafsirkan dengan cara menghubungkan serta menyesuaikan dengan hasil wawancara, dan dokumentasi. Setelah itu, data analisis secara menyeluruh untuk menghasilkan Kesimpulan yang berkaitan dengan fokus penelitian.

3.8 Teknik Analisis Data

Analisis data yang dilakukan oleh peneliti menggunakan analisis data kualitatif. Menurut Sahir, H.S. (2021), analisis data kualitatif lebih kompleks dibandingkan kuantitatif karena sifatnya yang dinamis dan dapat berkembang sesuai kondisi lapangan. Analisis data tersebut mencakup:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses menyaring dan menyederhanakan informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Proses reduksi berlangsung terus-menerus selama penelitian sehingga menghasilkan catatan inti yang lebih mudah dipahami dari data lapangan yang kompleks. Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan dengan merangkum inti kegiatan Garuda Keadilan di Provinsi Lampung.

2. Penyajian Data

Peneliti menggunakan penyajian data untuk mempermudah dalam memahami peristiwa dan kegiatan yang diteliti. Menurut Sahir, H. S. (2021), penyajian data dilakukan dengan mengorganisasikan informasi secara sistematis, baik dalam bentuk naratif, table maupun klasifikasi

tertentu sesuai dengan pokok permasalahan. Tujuannya adalah agar data yang ditampilkan mudah dipahami tanpa mengurangi makna, serta membantu peneliti dalam menarik kesimpulan.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan merupakan bagian dari keseluruhan proses analisis data. Pada tahap ini, peneliti menelaah dan meninjau kembali data secara berulang untuk memastikan temuan yang dihasilkan benar-benar akurat dan sesuai dengan fokus penelitian.

3.9 Teknik Keabsahan Data

Menurut Norman, triangulasi diartikan sebagai suatu kombinasi atau penggabungan berbagai metode yang digunakan untuk menelaah suatu fenomena yang saling berkaitan dari beragam sudut pandang maupun perspektif yang berbeda (dalam Susanto dan Jailani 2023). Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan teknik keabsahan data dengan menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber yaitu menguji keabsahan data dengan membandingkan hasil wawancara yang diperoleh dari berbagai informan. Cara ini membantu memastikan informasi yang diperoleh lebih akurat dan dapat dipercaya (Susanto dan Jailani 2023).

IV. GAMBARAN UMUM

4.1 Gambaran Umum Partai Keadilan Sejahtera

4.1.1 Sejarah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Lampung

Partai Keadilan Lampung dideklarasikan pada Bulan September 1998 dengan deklarator dan para pendiri yang terlibat: Ir. Abdul Hakim, Drs. Gufron Azis Fuadi, Ir. Hantoni Hasan, Hilmudin Tsulani, Lc, Ir. Johan Sulaiman, dan Ir. Ahmad Junaidi Auly. Untuk kepengurusan sendiri terbentuk pada tanggal 20 September 1998. Tidak lama kemudian dibentuklah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di 7 kabupaten atau kota di Lampung. Konsekuensi dari perolehan suara Partai Keadilan secara nasional dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 1999 yang hanya 1,8 persen, Partai Keadilan tidak dapat mengikuti Pemilu pada tahun 2004. Undang-Undang sendiri mengatur bahwa partai yang boleh mengikuti Pemilu 2004 adalah yang perolehan suaranya lebih dari 2 persen atau partai-partai baru. Oleh karena itu, untuk bisa kembali “bertarung”, Partai Keadilan menggabungkan dirinya dengan Partai Keadilan Sejahtera dengan nama Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Deklarasi secara nasional di Jakarta dilakukan pada Bulan Juli 2002. Sedangkan penggabungan PK dengan PKS Lampung sebagai konsekuensi penggabungan di tingkat pusat terjadi pada tanggal 5 Agustus 2003.

Susunan pengurus (presidium) pada saat itu adalah:

Ketua Umum	: Ir. H. Ahmad Junaidi Auly
Ketua I	: Ir. Efan Tolani
Ketua II	: Ir. Murdiansyah Mulkan
Ketua III	: Drs. Gufron Azis Fuadi
Ketua IV	: Ir. Nenden Tresnanursari

Sekretaris Umum : Ahmad Jajuli, S.Pd.

Wakil Sekretaris : Ir. Munawardi

Bendahara : Ir. Johan Sulaiman

(Sumber: Dokumen PKS)

4.1.2 Visi dan Misi Partai Keadilan Sejahtera

Visi dan misi PKS diatur dalam Anggaran dasar pada Bab II pasal 6 dan 7 tahun 2025 sebagai berikut:

a. Visi PKS

Menjadi pelopor terwujudnya cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima).

b. Misi PKS

- 1) Menyiapkan kader pemimpin bangsa yang bersih, peduli, profesional, dan negarawan.
- 2) Membangun tata kelola Partai yang baik bagi terwujudnya penyelenggaraan negara yang bersih dan berwibawa.
- 3) Mengokohkan kepeloporan Partai dalam pelayanan, pemberdayaan, dan pembelaan terhadap masyarakat.
- 4) Menjadikan Partai sebagai sarana perwujudan masyarakat madani yang adil, sejahtera, dan bermartabat dalam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila, serta berperan aktif dalam perdamaian dunia.

(Sumber: AD/ART, 2025)

4.1.3 Tujuan dan Fungsi Partai Keadilan Sejahtera

Tujuan dan fungsi partai diatur dalam Anggaran Dasar PKS dalam Bab III pasal 8 dan 9 tahun 2025 sebagai berikut:

Tujuan Partai adalah:

- a. Memperjuangkan Visi dan Misi Partai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. Memenuhi hak, kewajiban, dan tanggung jawab politik setiap Anggota Partai sebagai warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- c. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan Anggota Partai dan masyarakat;
- d. Meningkatkan partisipasi politik Anggota Partai dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan; dan
- e. Turut membangun etika dan budaya politik yang beradab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Partai berfungsi:

- a. Menyenggarakan pendidikan politik;
- b. Menyenggarakan kaderisasi kepemimpinan bangsa dan negara;
- c. Memperjuangkan dan membela kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara melalui jalur politik; dan
- d. Memelihara dan memperjuangkan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila.

(Sumber: AD/ART, 2025)

4.2 Gambaran Umum Sayap Partai

4.2.1 Definisi Sayap Partai

Sebagaimana ditulis dalam Pasal 12 huruf j Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai politik bahwa salah satu hak partai adalah membentuk dan memiliki organisasi sayap Partai Politik. Organisasi sayap partai adalah organisasi yang dibentuk oleh dan/atau mendeklarasikan diri sebagai bagian dari sayap Partai Politik, sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tiap Partai Politik. Pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, organisasi sayap partai politik dapat dibentuk secara langsung oleh partai politik, namun terdapat juga yang tidak dibentuk

langsung oleh partai politik. Organisasi sayap lahir langsung dari partai politik, keberadaannya disebut dan diatur secara jelas dalam AD/ART partai, tetapi ada pula yang tidak secara eksplisit disebut maupun diatur dalam AD/ART (Syukur, A. 2024).

Organisasi sayap partai merupakan kelompok yang dibentuk oleh atau menyatakan diri sebagai bagian dari, sayap suatu partai politik dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga masing-masing partai. Bentuk organisasi sayap ini dapat mencakup pemuda, perempuan, buruh, petani, profesi tertentu, maupun kelompok masyarakat lainnya. Keberadaan organisasi sayap menjadi aset strategis yang harus dibina, dikembangkan, dan diberdayakan oleh partai politik. Hal ini karena organisasi sayap berperan penting sebagai instrumen untuk menarik dukungan dan simpati dari berbagai lapisan masyarakat, yang pada akhirnya membantu partai meraih kemenangan dalam kontestasi politik (Pemilu) dengan cara yang elegan dan bermartabat (Aprizon, dkk. 2023). Menurut Ferdian, dkk. (2020) organisasi sayap partai diharapkan mampu menjaga keberlangsungan eksistensi partai serta memastikan roda organisasi partai tetap berjalan.

Peran organisasi sayap partai tidak semata-mata terbatas pada fungsi mobilisasi massa dalam rangka memenangkan pemilihan umum. Organisasi sayap partai politik berfungsi sebagai penghubung antara kepentingan partai dengan konstituen. Selain itu, organisasi ini melaksanakan program kerja partai politik di wilayah yang umumnya sulit dijangkau oleh struktur inti partai. Dengan demikian, organisasi sayap juga berperan dalam menjembatani aspirasi konstituen dengan partai politik, sehingga mempermudah terbangunnya komunikasi politik yang efektif. Sebagai organisasi otonom, organisasi sayap memiliki fokus pada bidang tertentu dan melaksanakan berbagai kegiatan untuk mengimplementasikan program partai. Melalui mekanisme ini, partai politik dapat lebih dekat

dengan masyarakat sekaligus menjaring kader-kader yang dianggap mumpuni untuk bergabung dalam partai politik (Wijayanti, 2021).

Organisasi sayap partai dibentuk dengan tujuan untuk melaksanakan kebijakan partai, memenuhi kebutuhan strategis dalam memperkuat basis dukungan serta meningkatkan fungsi dan peran partai di tengah masyarakat (Febrianty dan Ghafur. 2020). Menurut (Djadijono dalam Saifulloh. 2020) tujuan dibentuknya organisasi sayap partai adalah untuk menjalankan kebijakan partai serta memenuhi kebutuhan strategis dalam memperkuat basis dukungan partai politik. Selain itu, organisasi sayap partai juga berfungsi memperkuat peran dan fungsi partai ditengah masyarakat. Keberadaan organisasi sayap partai menunjukkan bahwa organisasi ini bukan sekedar pelengkap struktur partai, melainkan kebutuhan yang nyata dan harus dipenuhi, sekaligus menjadi bagian penting dalam mendukung eksistensi dan perkembangan partai politik.

Organisasi sayap partai merupakan perpanjangan tangan dari partai politik, sehingga memiliki peran yang signifikan dalam mewujudkan visi dan misi partai. Pelaksanaan fungsi partai politik tidak hanya terbatas pada kader dan pengurus inti, tetapi juga perlu menjangkau kader yang ada di organisasi sayap partai. Melalui jalur ini, partai diharapkan mampu memberikan pendidikan politik yang berkelanjutan sehingga dapat melahirkan kader-kader unggul sebagai generasi penerus partai. Organisasi sayap partai merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari partai induk karena memiliki peran strategis dalam rekrutmen dan kaderisasi. Melalui organisasi sayap, partai lebih mudah menjaring calon kader sekaligus menanamkan ideologi partai secara mendalam dibandingkan dengan mekanisme rekrutmen dari luar. Rekrutmen politik dari organisasi sayap juga menjadi sarana perluasan basis dukungan yang efektif, terutama menjelang pemilu ketika organisasi ini berfungsi sebagai alat untuk menghimpun dukungan politik dan meningkatkan perolehan suara (Wijayanti, 2021).

4.2.2 Fungsi Sayap Partai

Secara umum, fungsi organisasi sayap partai politik hampir sama dengan partai politik induknya. Namun, anggota organisasi sayap biasanya lebih terbatas, tergantung jenisnya, seperti pemuda, perempuan, buruh, atau ulama. Selain itu, organisasi sayap juga berperan dalam mendidik masyarakat agar memiliki kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual, yang penting untuk meningkatkan daya kritis serta partisipasi politik. Organisasi ini juga membimbing dan memberikan advokasi agar masyarakat berani menuntut dan menegakkan hak-hak politiknya. Organisasi sayap berfungsi sebagai wadah pelatihan dan pendidikan politik bagi kader baru agar mereka memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk berperan aktif di dalam partai (Wijayanti, 2021).

Fungsi utama organisasi sayap partai politik sangat dipengaruhi oleh ideologi partai induk dan segmentasi anggotanya. Misalnya, organisasi sayap yang anggotanya pemuda memiliki kegiatan dan agenda yang berbeda dengan organisasi sayap yang anggotanya perempuan atau buruh. Secara umum, fungsi organisasi sayap meliputi beberapa hal. Pertama, fungsi ideologi, yaitu mempromosikan ideologi partai induk kepada masyarakat luas dan membentuk perilaku ideologis bagi anggotanya. Kedua, fungsi pendidikan, yaitu mendidik dan melatih anggota untuk mempersiapkan karir politik. Ketiga, fungsi rekrutmen, yang menjadikan organisasi sayap sebagai jalur untuk berkarir di partai induk. Keempat, fungsi perwakilan dan lobi, yakni mewakili kepentingan kelompok tertentu, seperti pemuda atau perempuan, agar aspirasi mereka terdengar melalui partai induk. Kelima, fungsi partisipasi, yakni mendorong anggota untuk ikut aktif dalam kegiatan partai, termasuk kampanye pemilu. Terakhir, fungsi sosialisasi, yaitu menyediakan berbagai kegiatan mulai dari politik hingga olahraga dan kegiatan sosial lainnya (Omara, A. 2019).

Partai politik pada umumnya memiliki organisasi sayap yang beragam sesuai dengan orientasi ideologi masing-masing. Partai nasionalis

cenderung mengutamakan organisasi sayap yang berfokus pada penghimpunan dukungan dari kalangan petani dan buruh, sedangkan partai berbasis agama lebih menitikberatkan pada organisasi sayap yang bergerak dalam bidang dakwah. Hal ini sejalan dengan hak partai politik untuk membentuk organisasi sayap yang dapat menjangkau berbagai elemen masyarakat (Ferdian,R. dkk. 2020). Menurut Omara (2019) keberadaan partai politik hampir selalu terkait dengan eksistensi organisasi sayap partai, dimana partai politik berperan sebagai organisasi induk bagi sayap partai tersebut. Sayap partai membantu partai politik dalam memasyarakatkan serta melaksanakan program-program partai. Selain itu, organisasi sayap partai memegang peran strategis dalam menggerakkan dukungan massa guna membantu partai meraih keberhasilan dalam kontestasi politik. Organisasi sayap partai berfungsi sebagai pendukung aktif partai politik, serta turut serta dalam pelaksanaan program-program partai yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

4.3 Gambaran Umum Garuda Keadilan

4.3.1 Sejarah Garuda Keadilan

Garuda keadilan didirikan pada 28 maret 2012. Dibentuk berawal dari keresahan para orang tua terhadap kondisi generasi muda saat ini. Garuda Keadilan (GK) muncul untuk menjawab tantangan zaman. Harapan besar diletakkan di pundak sekelompok pemuda dan pemudi yang tergabung ke dalam Garuda Keadilan. Kehadiran garuda keadilan diharapkan dapat merangkul generasi muda untuk bersama melanjutkan perjuangan dakwah Islam. Garuda Keadilan adalah sebuah "Rumah Besar" (wadah silaturahmi) anak kader Partai Keadilan Sejahtera yang berbentuk paguyuban, yang memiliki tujuan mengajak semua anak kader untuk peduli dengan perjuangan dakwah yang sudah dimulai oleh orang tua kita sejak lama.

4.3.2 Visi dan Misi Garuda Keadilan

a. Visi

Melahirkan pemimpin muda yang berkepribadian muslim, mushlih, kreatif, inovatif, dan profesional.

b. Misi

- 1) Melaksanakan kegiatan yang meningkatkan kualitas akhlaq
- 2) Membuat program untuk menunjang pengembangan potensi pemuda Islam
- 3) Menyalurkan dan mewadahi minat dan bakat anggota
- 4) Menumbuhkan jiwa kepemimpinan anggota
- 5) Mengokohkan rasa cinta kepada lingkungan keluarga, masyarakat, dan bernegara.

(Sumber: Dokumen GK)

4.3.3 Struktur Pimpinan Garuda Keadilan

Tabel 4.1 Struktur Pimpinan GK Periode 2025-2028

No.	Jabatan	Nama
1.	Ketua Umum	Fajar Ghosyiah
2.	Ketua Harian	Farhan Aulia Al Fatah
3.	Sekretaris	Najmina Yoemi Fatiha
4.	Bendahara	Adilah Millatilhaq
5.	Bidang Kaderisasi	M. Iqbal Arfani & Syifa A.
6.	Divisi Litbang	Fadhillah Washilah
7.	Divisi Teritori	Rayhan Zaky
8.	Bidang Cipta Karya	M. Khozy & Husna K.
9.	Divisi Minat Bakat	Nyimas Lathifa Azzahra
10.	Divisi EO & Protokol	Ikhwan Alghifari
11.	Bidang MARKOM	M. Yusuf A. & Maritsa Husna
12.	Divisi Media	Syifa Khoirunnisa
13.	Divisi Humas	Faqih Nurul Haqqi

(Sumber: Dokumen GK)

a. Bidang Kaderisasi

Bidang Kaderisasi bertanggung jawab atas proses pembinaan, pengembangan, dan pemantapan kader Garuda Keadilan Lampung. Fokus utamanya adalah memastikan setiap kader memiliki kelompok UPA, semangat perjuangan, dan kapasitas kepemimpinan yang sesuai dengan nilai-nilai Partai Keadilan Sejahtera. Bidang ini menyusun kurikulum kaderisasi, mengadakan pelatihan, mentoring, serta mengelola database kader secara sistematis. Fungsi utama dari bidang ini yaitu untuk menyusun dan melaksanakan program kaderisasi berjenjang, membina dan memantau perkembangan kader, menyaring dan merekrut calon kader baru yang potensial.

Terdapat dua divisi dalam bidang ini, yaitu sebagai berikut:

1) Divisi Pelatihan dan Pengembangan

Divisi pelatihan dan pengembangan yang bertugas menyusun dan melaksanakan program pelatihan untuk meningkatkan kapasitas, karakter, dan militansi kader. Fokus utamanya adalah memastikan setiap kader memiliki kompetensi ideologis, intelektual, dan kepemimpinan yang memadai untuk menjadi penggerak perubahan di Partai Keadilan Sejahtera. Tugas pokok divisi ini untuk menyusun kurikulum dan model pelatihan kader, menyelenggarakan pelatihan rutin, upgrading, dan leadership camp serta mengembangkan sistem mentoring dan coaching kader.

2) Divisi Teritori

Divisi ini mengelola distribusi kader secara wilayah dan mengordinasikan jaringan kader di setiap kabupaten. Divisi ini juga menjadi penghubung antara pusat dan basis, serta memastikan keberlangsungan aktivitas kaderisasi di seluruh daerah. Tugas pokok divisi ini membentuk dan membina struktur Garuda Keadilan di tingkat daerah, memonitor perkembangan dan kebutuhan kader per daerah, mengkoordinir keberlangsungan

perkembangan GK, dan menjadi jembatan komunikasi dan pelaporan antar level struktur.

b. Bidang Cipta Karya

Bidang Cipta Karya bertugas mengembangkan ide-ide kreatif, program inovatif, dan solutif untuk menjawab kebutuhan masyarakat serta menunjang aktivitas organisasi. Bidang ini menjadi dapur produksi gagasan dan pelaksanaan kegiatan yang mencerminkan semangat perkembangan dan kebermanfaatan kader muda PKS. Fungsi utama dari bidang ini untuk merancang dan mengeksekusi program-program inovatif berbasis kepemudaan, menginisiasi karya sosial, ekonomi, dan lingkungan yang memberi dampak nyata, dan menjadi laboratorium ide dan ruang kreasi kader.

Terdapat dua divisi dalam bidang ini, yaitu sebagai berikut:

1) Divisi Minat Bakat

Divisi ini bertugas menggali, memfasilitasi dan mengembangkan potensi kader di bidang seni, olahraga, budaya, dan keilmuan. Tujuannya adalah menciptakan ruang ekspresi yang positif serta menumbuhkan kader yang unggul dan berprestasi di bidangnya masing-masing. Tugas pokok divisi ini mengadakan kegiatan pengembangan bakat(lomba, pelatihan,pementasan), menyusun database potensi kader sesuai bidangnya, dan membina komunitas kader berbasis minat dan bakat.

2) Divisi EO & Protokol

Divisi ini bertanggung jawab sebagai pelaksana teknis dalam kegiatan Garuda Keadilan, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Selain itu, divisi ini juga mengatur jalannya acara agar berjalan profesional, tertib, dan sesuai dengan standar organisasi. Tugas pokok menjadi event organizer kegiatan resmi organisasi, menyusun dan menjalankan protokol acara, termasuk MC dan

susunan acara, menyiapkan kebutuhan teknis acara (logistik, tempat, perlengkapan) dan membuat SOP Protokol dan EO.

c. Bidang Marketing dan Komunikasi

Bidang MarKom bertugas membangun citra positif Garuda Keadilan Lampung melalui strategi komunikasi publik yang efektif dan kampanye digital yang kuat. Bidang ini juga bertanggung jawab dalam pengelolaan media sosial, dokumentasi kegiatan, serta menjalin relasi dengan media dan masyarakat luas. Fungsi utama dari bidang ini untuk menyusun strategi komunikasi dan branding organisasi, mengelola konten media sosial, publikasi, dan dokumentasi kegiatan, serta menjalin kolaborasi komunikasi dengan mitra internal dan eksternal.

Terdapat dua divisi dalam bidang ini, yaitu sebagai berikut:

1) Divisi Media

Divisi ini bertugas mengelola seluruh konten digital Garuda Keadilan, termasuk desain grafis, video, narasi, dan dokumentasi. Divisi ini menjadi ujung tombak dalam menciptakan citra visual yang menarik, inspiratif, dan sesuai dengan semangat dakwah anak muda. Tugas pokoknya membuat jadwal konten digital harian/mingguan untuk media sosial, mendokumentasikan kegiatan organisasi, dan menjaga kualitas dan konsistensi branding visual Garuda Keadilan.

2) Divisi Humas

Divisi humas bertugas menjalin relasi komunikasi antara Garuda Keadilan dengan publik, media sosial, tokoh masyarakat, dan organisasi mitra. Divisi ini juga menjadi penghubung utama dalam menyampaikan pesan, klasifikasi, dan siaran pers secara resmi. Tugas pokoknya menjalin hubungan dengan pihak eksternal (media, tokoh, lembaga), menyusun dan menyebarkan rilis pers atau pernyataan resmi organisasi, menangani komunikasi krisis dan

penguatan citra organisasi di publik serta inventarisasi mitra horizontal.

VI. SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Menurunnya Aktivitas Kader Garuda Keadilan (GK) Sayap Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Lampung Tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa menurunnya tingkat keaktifan dan partisipasi kader GK dipengaruhi oleh sistem kaderisasi organisasi yang belum berjalan secara optimal, terlembaga dan berkelanjutan.

Sistem kaderisasi di Garuda Keadilan belum didukung oleh standar prosedur operasional (SOP) kaderisasi yang jelas dalam mengatur proses kaderisasi, mulai dari perekrutan, pelatihan, hingga pengembangan kader, sehingga proses kaderisasi tidak hanya bertumpu pada aturan etika. Aturan etika atau Code of Conduct menjadi norma dominan dalam mengatur kehidupan organisasi. Kondisi ini menyebabkan proses kaderisasi tidak terarah dan berdampak pada menurunnya kenyamanan serta keterikatan kader terhadap organisasi.

Model rekrutmen kader yang belum sepenuhnya terbuka dan inklusif. Meskipun GK menerapkan sistem open recruitment dan mempublikasikan informasi rekrutmen melalui media sosial, jangkauan rekrutmen masih terbatas pada jaringan internal, yaitu anak kader PKS. Pola rekrutmen yang cenderung homogen tersebut menyebabkan regenerasi kader berlangsung dalam lingkaran sosial yang sama, sehingga membatasi keberagaman latar belakang dan gagasan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kejenuhan di kalangan kader muda karena dinamika organisasi dianggap kurang variatif, yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya motivasi dan keaktifan kader.

Sistem pembinaan dan evaluasi kader belum berjalan secara optimal dan berkesinambungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada periode

kepengurusan sebelumnya, kader yang telah dinyatakan lulus rekrutmen belum memperoleh arahan yang jelas mengenai tahapan pembinaan lanjutan, peran organisasi, serta indikator keberhasilan kaderisasi. Evaluasi pembinaan belum dilakukan secara rutin dan terstruktur, sehingga tidak mampu mendeteksi dan menindaklanjuti penyebab ketidakaktifan kader secara dini. Ketidakjelasan pembinaan dan lemahnya evaluasi ini menyebabkan kader kehilangan orientasi dan tujuan dalam berorganisasi.

Pembentukan jaringan kerja kader melalui interaksi antar kader belum berlangsung secara merata. Meskipun GK telah menyediakan ruang interaksi melalui pertemuan formal dan informal, intensitas keterlibatan kader dalam kegiatan organisasi dirasakan tidak sama oleh seluruh kader. Sehingga tidak semua kader memiliki ikatan emosional, rasa kebersamaan, Keterbatasan interaksi dan pelibatan kader ini turut berkontribusi terhadap menurunnya keaktifan kader dalam organisasi.

Penerapan prinsip *affirmative action* dalam GK telah berjalan dengan baik. Ditunjukkan melalui keterlibatan kader Perempuan dalam struktur kepengurusan dan kegiatan organisasi, termasuk pada posisi strategis, serta tidak adanya pembedaan perlakuan berdasarkan gender. Penerapan *affirmative action* ini menjadi salah satu kekuatan organisasi dalam mendorong kesetaraan dan partisipasi kader perempuan.

Model pembinaan kader Perempuan di GK menunjukkan praktik yang baik melalui pendekatan yang partisipatif dan inklusif dengan memberikan ruang yang setara bagi kader Perempuan untuk berpendapat dan terlibat aktif dalam berbagai kegiatan dan forum organisasi, termasuk dalam ruang-ruang diskusi dan pengambilan keputusan. Pembinaan kader perempuan masih bersifat umum dan belum memiliki pola pembinaan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan kader Perempuan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa menurunnya keaktifan kader Garuda Keadilan dipengaruhi oleh belum optimalnya sistem kaderisasi Organisasi yang berjalan secara menyeluruh, terlembaga, dan berkelanjutan.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah dikemukakan, maka saran yang dapat Peneliti berikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Garuda Keadilan disarankan untuk Menyusun dan menetapkan SOP kaderisasi yang tertulis jelas, terstruktur, dan terlembaga, mulai dari perekrutan, pembinaan, hingga pengembangan kader, agar pelaksanaan kaderisasi berjalan lebih terarah dan konsisten.
2. Garuda Keadilan disarankan untuk memperluas jangkauan rekrutmen kader dengan menerapkan model rekrutmen yang lebih terbuka dan inklusif, sehingga dapat menjaring kader dari latar belakang yang lebih beragam guna memperkaya dinamika Organisasi dan mencegah kejenuhan.
3. Garuda Keadilan disarankan untuk memperkuat sistem pembinaan dan evaluasi kader secara berkelanjutan, khususnya pada tahap pasca rekrutmen, dengan menetapkan tahapan pembinaan yang jelas, serta evaluasi rutin untuk menjaga orientasi dan motivasi kader.
4. Garuda Keadilan disarankan untuk meningkatkan pembentukan jaringan kerja dan interaksi antar kader melalui pelibatan kader yang lebih merata dalam kegiatan organisasi, baik formal maupun informal, untuk memperkuat rasa kebersamaan, solidaritas, dan loyalitas kader.
5. Garuda Keadilan disarankan untuk mempertahankan dan memperkuat penerapan prinsip *affirmative action* dengan menjadikan sebagai bagian dari kebijakan kaderisasi organisasi. Penguatan ini diharapkan dapat menjaga keberlanjutan partisipasi kader Perempuan serta meningkatkan kualitas kaderisasi secara keseluruhan.
6. Garuda Keadilan disarankan untuk merancang dan menerapkan model pembinaan khusus bagi kader perempuan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan kader perempuan dapat berkembang secara optimal dan mendukung keberlanjutan keaktifan kader dalam organisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulhadi, D. (2019). Penataan Pengaturan Organisasi Sayap Partai Dalam Kerangka Pelembagaan Partai Politik. *In National Symposium of Constitutional Law* (pp. 29-39).
- Abdussamad, Z. (2021). Buku Metode penelitian kualitatif. Syakir Media Press.
- Alamsyah, S. B., & Hendra, H. (2023). Peran Sayap Kepemudaan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam meningkatkan partisipasi politik generasi millennial dan generasi Z di Indonesia. *Aliansi: Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional*, 2(1), 54-60.
<https://doi.org/10.24198/aliansi.v2in1.43902>
- Al-Farizi, M. R., Tania, R., Yunita, I., Sulaksono, T. P., & Kusuma, F. A. (2025). Melihat Peran Organisasi Garuda Keadilan Lampung Dalam Membentuk Karakter dan Kesadaran Sosial Politik Generasi Muda. *JURNAL ILMIAH PENELITIAN MAHASISWA*, 3(3), 712-719.
<https://doi.org/10.61722/jipm.v3i3.1016>
- Aprizon, K., Yunizir, D., & Rahmat, S. (2023) *Strategi Partai Keadilan Sejahtera Dalam Melakukan Rekrutmen Kader Melalui Sayap Partai (Studi Kasus DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Oku)* (Doctoral dissertation, Universitas Baturaja).
- Budiardjo, M. (2008). Dasar-dasar ilmu politik. Jakarta: Gramedia Pustaka utama.
- Fales, S. (2018). Fungsi Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Ditinjau Dari Hukum Positif. *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 3(2), 199-210. <https://doi.org/10.29300/imr.v3i2.2152>
- Fauzan, R. dkk. (2023). Manajemen dan Motivasi. Padang: Get Press Indonesia.
- Febrianty, Y., & Ghafur, J. (2020). Peran Organisasi Sayap Partai Politik (OSP) dalam Mencegah Kemerosotan Keanggotaan Partai Politik di Indonesia. *Prosiding Simposium Hukum Tata Negara "Penataan Pengaturan Organisasi Sayap Partai Politik"* (1st ed). Yogyakarta: FH UII Press.
<https://doi.org/10.31219/osf.io/s9avh>
- Ferdian, R., Cahyadi, R., Krisbintoro, S., & Indrajat, H. (2020). Model kaderisasi partai politik melalui sayap partai. *Wacana Publik*, 14(1), 475-491.
<https://doi.org/10.37295/wp.v14i01.39>

- Harahap, I. H. (2017). Kaderisasi Partai Politik dan Pengaruhnya Terhadap Kepemimpinan Nasional.
- Haris, S. dkk. (2016). Panduan Rekrutmen dan Kaderisasi Partai Politik Ideal di Indonesia. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Hermansyah. (2020). Pengantar Hukum Partai Politik. Jakarta: Kencana.
- Irawan, Y. (2020). *Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Sistem Kaderisasi Perempuan Oleh Partai Politik Berbasis Islam (Studi di Partai Keadilan Kota Bandar Lampung)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Khosiah, K., Hajrah, H., & Syafril, S. (2019). Persepsi Masyarakat Terhadap Rencana Pemerintah Membuka Area Pertambangan Emas di Desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 1(2), 141-149. <https://doi.org/10.58258/jisip.v1i2.219>
- Muhfizar. dkk. (2021). Pengantar Manajemen (Teori dan Konsep). Bandung: Media Sains Indonesia.
- Omara, A., & UGM, P. H. T. N. F. (2019). Eksistensi Organisasi Sayap Partai Politik Dalam Sistem Politik di Indonesia. *Eksistensi Organisasi Sayap Partai Politik Dalam Sistem Politik di Indonesia*.
- Sahir, H. S. (2021). Metode Penelitian. Jogjakarta: Penerbit KBM Indonesia.
- Saifulloh, P. P. A. (2020). Politik Hukum Pengaturan Organisasi Sayap Partai Politik dalam Hukum Positif Indonesia. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 17-32. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v3i2.3974>
- Saleh, Z. A. (2018). Demokrasi dan partai politik. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 5(1), 56-80. <https://doi.org/10.54629/jli.v5i1.289>
- Sartika, Y. (2024). *Perbandingan strategi kaderisasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) di Nusa Tenggara Barat* (Doctoral dissertation, UIN Mataram).
- SHOFFI, S. S. (2025). Pola Kaderisasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dalam Pengembangan Kader Muda Di Provinsi Lampung.
- Siagian, P. S. (2012). Teori Motivasi Dan Aplikasinya. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soraya, D., Astuti, M. P., Lorensa, L., Mentari, A., & Saputri, R. Y. (2025). Peran Organisasi Kepemudaan Sebagai Wadah Generasi Muda: Studi Kasus Garuda Keadilan Bandar Lampung. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 3(2), 184-191. <https://doi.org/10.61722/jipm.v3i2.822>
- Siregar, Z. R. (2020). *Partai Politik Dan Rekrutmen (Studi Sistem Rekrutmen Partai Keadilan Sejahtera Terhadap Pemuda)* (Bachelor's thesis, Fisip UIN Jakarta).
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif)*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sulung, U., & Muspawi, M. (2024). Memahami sumber data penelitian: Primer, sekunder, dan tersier. *Edu Research*, 5(3), 110-116.
- Susanto, D., & Jailani, M. S. (2023). Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian Ilmiah. *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 1(1), 53-61. <https://doi.org/10.61104/jg.v1i1.60>
- Syabilla, D. (2025). Transformasi Artis Menjadi Politisi: Fenomena Keterlibatan Artis Pada Kontestasi Politik. *Journal of Politic and Government Studies*, 14(2), 369-382.
- Syahputra, M. R., & Darmansah, T. (2020). Fungsi Kaderisasi Dalam Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan. *Journal Of Education And Teaching Learning (JETL)*, 2(3), 20-28. <https://doi.org/10.51178/jetl.v2i3.6>
- Syukur, A. (2024). *Manajemen Partai Politik (Studi Pada Organisasi Garuda Keadilan Terhadap Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Partai Keadilan Sejahtera Di Kota Makassar)= Political Party Management (Study On The Garuda Justice Organization On The Recruitment Of Candidate Legislative Members Of The Justice Prosperous Party In Makassar City)* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Tumanduk, M. C., Pati, A. B., & Tompodung, J. (2022). Implementasi fungsi partai politik sebagai sarana rekrutmen politik pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal eksekutif*, 2(2).
- Utama, A. S. (2021). Motivasi Perempuan Bergabung Dalam Partai Politik. *Jurnal Dinamika*, 1(2), 48-52. <https://doi.org/10.54895/dinamika.v1i2.1133>
- Utama, A. S. (2023). Pengaturan partai politik di Indonesia. *Andrew Law Journal*, 2(2), 44-52. <https://doi.org/10.61876/alj.v2i2.19>
- Wibawa, L., Amalia, A., Ramadoni, A. A., Huda, M. K., Alimi, F., & Larassaty, A. L. (2022). Implementasi Pengembangan Sumber DAYA Manusia Dalam Upaya Meningkatkan Kompetensi Kinerja Karyawan Di Pt. Jalur Nugraha Ekakurir Counter Agen Park Royal Sidoarjo. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 9(2), 19-24. <https://doi.org/10.34308/egien.v9i2.369>
- Wijayanti, S. N., & Iswandi, K. (2021). Peran organisasi sayap partai politik dalam kaderisasi partai politik di Indonesia. *Sasi*, 27(4), 475-491.
- Yusuf, M. A. (2014). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.